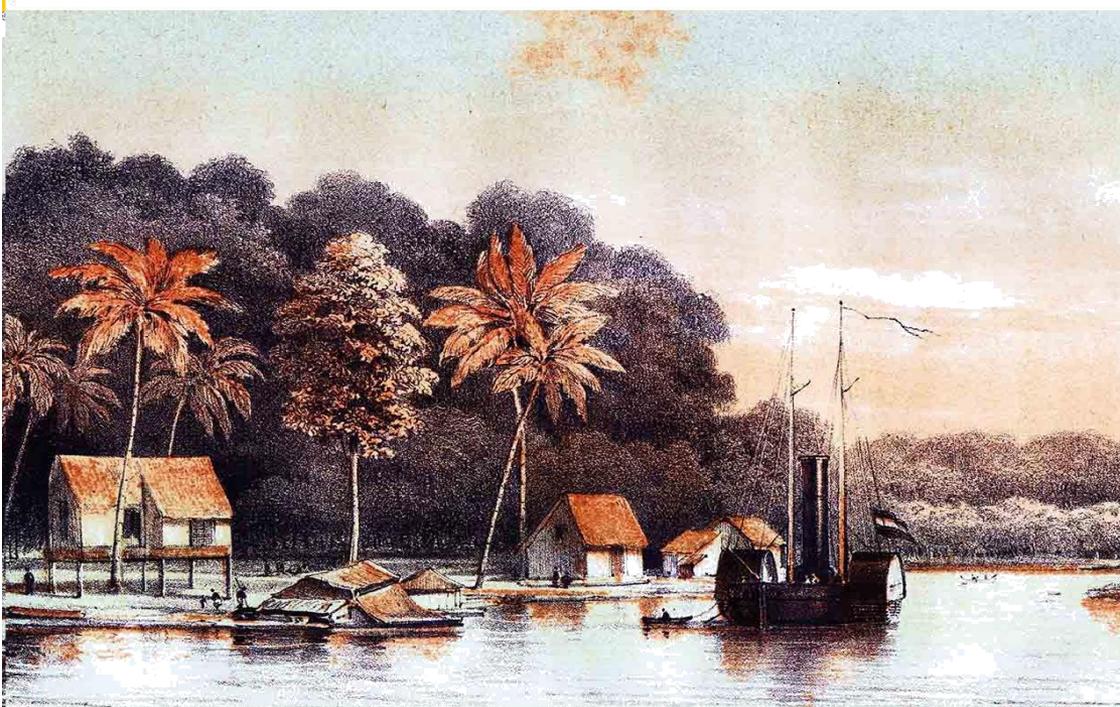


GERAKAN OPOSISI ORANG BANJAR



SETIA BUDHI, PhD

**GERAKAN OPOSISI
ORANG BANJAR**

SETIA BUDHI, PhD

Gerakan Oposisi Orang Banjar

Penulis:
Setia Budhi, PhD

Editor:
M Najeri Al Syahrin, S.IP., M.A

Cetakan 1, Oktober 2017

ISBN 978-623-91281-2-8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. Siapakah Orang Banjar ?	1
II. Gerakan Sosial dan Politik; Perspektif Antropologi	5
III Konsep Gerakan	16
IV Memahami Gerakan Oposisi	
Orang Banjar	22
A. Pendahuluan	22
B. Masyarakat Pesisir dan Etos Kesalehan Ekonomi	27
V. Konflik Agraria dan Gerakan Sosial Orang Banjar	35
A. Petani dan Konflik Agraria	35
B. Organisasi Politik Basis Agama	40
C. Revitalisasi Islam: Pengaruh Timur Tengah dan Jamaah Haji	44
VI. Resistensi Gerakan Oposisi Orang Banjar	47
A. Ibnu Hadjar : Pejuang <i>Mujahidin</i>	47

B. Hassan Basry: Episode Kaum Republikan	55
C. Dua Opsi Masyarakat Banjar di Amuntai: Islam atau Nasionalis	76
VII. Politik Sentralisasi Orde Baru	83
A. Munculnya Elit Politik Modern	83
B. Tercerabutnya Politik Lokalitas Orang Banjar	88
C. Perdebatan Sekitar Orientasi dan Pemahaman	92
VIII. Reaktualisasi Politik Orang Banjar	95
IX. Penutup	98
Daftar Pustaka	101

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah catatan sekilas tentang peristiwa di Kalimantan Selatan. Peristiwa yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saya melihatnya sebagai sebuah gerakan berbasis politik. Sampai menjelang tahun 1959, keinginan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia menjadi cita-cita utama perjuangan organisasi-organisasi Islam.

Sementara romantisme Soekarno tentang revolusi Indonesia sebagai "yang belum selesai" telah mendapat penentangan yang hebat dari kalangan organisasi Islam. Pertentangan antara tokoh dan konflik dalam memperjuangkan ideologi negara mencapai anti klimak dalam apa yang lebih dikenal dengan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, setelah peristiwa proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 7 Agustus 1949 di Kampung Cisampang, desa Cidugaleun, Kecamatan Leuwisari Tasikmalaya, yang dipimpin oleh seorang mantan ketua PSII Iman Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Menyusul pada tahun 1953 pemberontakan Darul Islam pimpinan Tengku Muhammad Daud Beureueh di daerah Aceh. Pemberontakan DI/TII Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 1953. Abdurrahman (1998) merepleksikan pergolakan dalam prinsip ideologi negara dalam kondisi semakin melebarnya pemberontakan di daerah-daerah dengan basis Darul Islam. Di Kalimantan Selatan yang kemudian dikenal dengan "Pemberontakan" Ibnu Hadjar.

Meskipun telah banyak analisis sejarah dengan beberapa alasan yang melatar belakangi "pemberontakan"

Ibnu Hadjar, karena masalah-masalah ketidakpuasan berkenaan dengan jabatan kemiliterannya yang kemudian mengadakan perlawanan dengan membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia Yang Tertindas (KRIYT), yang merupakan reaksi terhadap besarnya campur tangan pemerintah pusat terutama sekali oleh perwira-perwira yang berasal dari Jawa.¹¹ Cornelis. Van Dijk (1995) menyebut bahwa selain kekecewaannya terhadap para perwira militer yang ditugaskan di Kalimantan Selatan, kekecewaan Ibnu Hadjar juga disebabkan adanya semacam intervensi etnis, sebagaimana tuntutan yang kemudian tidak pernah dipenuhi.

Banjarbaru, Oktober 2017

Penulis

I. SIAPAKAH ORANG BANJAR ?

Walaupun hampir bersepakat tentang asal usul suku Orang Banjar yang mendiami kawasan Kalimantan Selatan sebagai percampuran antar etnik yang mendiami muara Sungai Barito, masih terdapat silang pandangan perihal data, informasi dan bukti-bukti yang sah. Mengikut beberapa kajian etnik Banjar merupakan orang yang tinggal di Kalimantan Selatan dan terdiri daripada beberapa sub etnik iaitu Banjar Kuala, Banjar Hulu dan Batang Banyu. Orang Banjar dikatakan merupakan hasil percampuran yang berlangsung sekian lama antara suku Proto Melayu yang mendiami daerah perbukitan Kalimantan Selatan dengan suku yang datang kemudian iaitu Deutero Melayu yang mendiami daerah-daerah pantai dan sungai.

Banjar ialah penduduk asli sebahagian wilayah provinsi Kalimantan Selatan atau daerah

sekitarnya dalam waktu yang lama. Percampuran penduduk dengan imigran yang datang kemudian, akhirnya membentuk subsuku Orang Banjar Pahuluan pada dasarnya ialah penduduk daerah lembah sungai-sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke Pegunungan Meratus. Orang Batang Banyu mendiami lembah sungai Negara, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami daerah sekitar Banjarmasin dan Martapura (Alfani Daud, 1997).

Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang pada dasarnya ialah bahasa Melayu— sama halnya seperti ketika mereka berada di daerah asalnya. Nama Banjar nampaknya sudah diterima secara umum dan disepakati sampai sekarang. Itu sebab nama Banjar dapat juga dilihat mengikuti nama daerahnya seperti Banjar Alai, Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, Banjar Kuala, Banjar Alabio, Banjar Kalua, Banjar Kandangan, Banjar Amuntai.

Menurut Idwar Saleh (1986: 12) sebelum dan pada awal berdirinya Kesultanan Islam Banjar, etnik Banjar pada waktu itu belum menjadi identitas suku atau agama, dan hanya sebagai identitas diri yang merujuk pada kawasan teritorial tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Idwar Saleh menyimpulkan suku Banjar terdiri dari tiga subetnik berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka dan unsur pembentukan suku:

1. Banjar Pahuluan; campuran Melayu dan Bukit (Bukit sebagai ciri kelompok).
2. Banjar Batang Banyu; campuran Melayu, Maayan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Maayan sebagai ciri kelompok)
3. Banjar Kuala; campuran Melayu, Ngaju, Barangas, Bakumpai, Maayan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Ngaju sebagai ciri kelompok)

Dalam perspektif genealogis masyarakat Banjar maka istilah Banjar sebenarnya bukan sekadar konsep etnik semata-mata, namun juga dikaitkan dengan konsep sosiologi kultural dan

religiusitas,” Banjar adakah persepaduan etnik melalui interaksi perkahwinan, perdagangan dan juga kekuasaan.

Banjar adalah sebuah dermaga perniagaan sebagai Bandar Masih, dikenal berbagai benua eropa, timur tengah dan Asia. Ketika pencarian rempah di bumi Kalimantan ini. Bandar Masih sebagai bandar orang Melayu dan etnik lain yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu rempah dan sumber daya alam.

Dalam Hikayat Banjar katanya, ada disebutkan bahawa proses ‘pembangunan’ bermula daripada kedatangan seorang saudagar bernama Empu Jatmika di Pulau Hujung Tanah. Keturunannya kemudian mendirikan Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha dan Kesultanan Banjarmasin. Ini kemudian menjadi sebuah formasi Empayer Kesultanan Banjar di kawasan Borneo, termasuk Kepulauan Sulu Philipina. Empayer

Kesultanan Banjar setidaknya dilihat dari kekuatan jaringan Dakwah Islam nya hingga ke Thai Selatan. Itu sebabnya Hikayat Banjar dapat ditemui istilah-istilah yang ada menyebut perkataan Banjar yang pada umumnya bermakna wilayah kesultanan di mana kerajaan dan penduduknya dikenali sebagai orang Banjar,

II. Gerakan Sosial dan Politik; Perspektif Antropologi

Penggunaan kata "gerakan" untuk merujuk pada fenomena sosial dan politik pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-19. Perubahan sosial skala besar dan bentuk-bentuk baru kesusahan manusia yang datang dengan industrialisme awal disertai dengan evaluasi ulang semantik dari istilah-istilah seperti "kapitalisme," "ideologi," "massa," "budaya," "revolusioner," dan banyak lagi. "Gerakan" mulai

digunakan untuk menggambarkan tanggapan kelompok terhadap isu sosial dan budaya. krisis yang dihasilkan oleh kondisi tenaga kerja pabrik dan kehidupan perkotaan selama revolusi industri.

Gerakan sosial dan politik melahirkan beberapa masalah yang sama dengan teori dan metode antropologis yang diangkat oleh faksi-faksi. Seperti halnya faksi, gerakan seringkali sederhana dan tidak stabil secara struktural dan juga berfungsi secara paradoksal karena dapat dilihat sebagai "disruptive" (dari tatanan sosial yang stabil) dan "adaptive" (pada tatanan sosial yang berubah).

Tetapi kesamaan berhenti di sini. Orang-orang yang membentuk faksi direkrut oleh seorang pemimpin berdasarkan ikatan khususnya dengan mereka sebagai individu, orang-orang yang membentuk suatu gerakan adalah kolektivitas moral, disatukan oleh komitmen ideologis yang sama.

Pemimpin fraksi biasanya politisi pragmatis yang legitimasinya bertumpu pada efektivitas jangka pendek; pemimpin suatu gerakan biasanya adalah figur luar biasa yang legitimasinya bertumpu pada karisma. Koherensi dan kegigihan sebuah faksi, yang seringkali luar biasa hebatnya, bergantung pada kelanjutan perjuangan politik yang merupakan alasannya; gerakan secara sosiologis dan ideologis lenyap, jarang muncul sama untuk lebih dari rentang waktu singkat.

Meskipun kontek faksi kadang-kadang tampaknya diperebutkan dengan isu-isu ideologis, ideologi paling sering digunakan sebagai penyamaran yang dapat diterima untuk perjuangan yang tidak dapat diterima atas kekuasaan pribadi; gerakan, bagaimanapun, ada untuk dan oleh ideologi mereka, dan tantangan yang berhasil untuk ideologi mengubah atau mengakhiri suatu gerakan. Seperti banyak masalah

yang memajukan teori dan metode dalam antropologi, masalah pemahaman gerakan berakar pada masalah etnografi empiris.

Para antropolog mengumpulkan data mereka dan menguji teorinya melalui "kerja lapangan" dan melalui perbandingan dengan hasil kerja lapangan lainnya. Teknik-teknik kerja lapangan disesuaikan dengan pengaturan mikro, namun semakin jelas bahwa suku-suku, desa-desa petani, dan saat ini kota-kota atau lingkungan perkotaan yang dipelajari oleh para antropolog hanyalah "masyarakat sebagian dengan budaya sebagian," seperti yang dikatakan Kroeber tentang komunitas petani. Selain itu, kami tidak tahu apakah unit-unit penelitian kami adalah "representatif" dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri dan, jika demikian, apa itu sesuatu itu.

Studi tentang pergerakan dalam masyarakat kontemporer menimbulkan masalah makrososiologi dan analisis seluruh budaya dalam proporsi yang dapat dipahami oleh para antropolog. Survei dan analisis komprehensif Winckler (1970) tentang satu dekade kerja tentang masalah-masalah politik oleh para antropolog adalah demonstrasi konklusif dari kemajuan menuju penyelesaian "masalah konseptual" yang dilihat Easton (1965) sebagai penghambat perkembangan antropologi "politik" yang jelas.

Pada saat yang sama, memeriksa analisis antropologis dari perspektif konsep dan sistem ilmuwan proses politik, Winckler mendeteksi kesenjangan besar. Mengomentari "input" kelompok (khususnya faksional) ke dalam proses politik, ia mencatat tidak adanya perhatian khusus pada "masalah politik yang dipertaruhkan." Dan dia berharap bahwa antropolog akan mengalihkan

perhatian mereka dan metode analitik baru mereka ke ideologi dan budaya politik.

Faksi dan arena skala kecil di mana mereka terjadi adalah konteks yang buruk untuk studi masalah, ideologi, dan budaya politik. Namun, dengan gerakan, justru sebaliknya yang terjadi.

Apa itu Politik? Ketika Fortes dan Evans-Pritchard (1969) meletakkan dasar-dasar antropologi political, mereka menolak teori "filsuf politik" yang mendukung ilmu empiris induktif. Mereka menaruh kepercayaan besar pada generalisasi berdasarkan "perilaku yang diamati". Untuk mencapai proposisi umum tentang perilaku politik mengasumsikan teori umum politik yang berlaku untuk semua masyarakat.

Upaya untuk menyusun teori semacam itu telah berlangsung terus-menerus dalam ilmu sosial. Apa yang umum di antara upaya terbaru adalah keyakinan bahwa referensi empiris dari teori

tersebut harus dapat diamati tindakan manusia-
"perilaku" adalah istilah resmi.

Diasumsikan bahwa jika kita dapat mengamati beberapa "perilaku" kita dapat mengetahui apa artinya - apakah itu tentang politik, ekonomi, kekerabatan, agama, atau hukum, atau itu adalah "multipleks," seperti yang dikatakan Gluckman, atau "secara fungsional menyebar," dalam istilah Parsons. Mencari sebuah teori untuk menjelaskan posisi aneh dari kekuatan politik dalam kaitannya dengan otoritas keagamaan di India klasik, Louis Dumont meneliti kembali karya "para filsuf politik" India. Dia menemukan konsepsi subordinasi hierarkis yang tanpanya ribuan contoh perilaku yang diamati tidak dapat dipahami.

Penemuan ini baru-baru ini membawanya (Dumont 1970) untuk mempertimbangkan kembali teori sosial dan politik Barat. Dia berpendapat bahwa sejauh menyangkut agama,

politik, dan ekonomi, "definisi kita saat ini mengekspresikan budaya kita sendiri, dan budaya kita sendiri - saya akan mengatakan ideologi kita sendiri - mewujudkan perkembangan yang luar biasa". Dilihat dari perspektif universal, sistem budaya Barat kontemporer (Dumont mengatakan hanya "ideologi modern") eksentrik dalam penilaian individu.

Bagi sebagian besar masyarakat dan sebagian besar sejarah, sifat-sifat khas kemanusiaan diturunkan dari masyarakat; hanya perkembangan ideologis baru-baru ini dan agak aneh dari agama Kristen di Barat yang memandang masyarakat sebagai sekumpulan individu. Individualisme telah memiliki sejumlah konsekuensi penting dalam pemikiran sosial Barat, dan konsekuensi ini sebagian besar membentuk asumsi yang tidak dipertimbangkan dalam ilmu sosial kontemporer.

Pada ketika yang sama, sebagian besar gerakan yang dipelajari oleh para antropolog umumnya dianggap sebagai fenomena "religius" karena mereka melibatkan kepercayaan mistis, mereka memunculkan kekuatan supranatural, mereka memproyeksikan fantasi eskatologis, atau memiliki beberapa karakteristik lain yang termasuk dalam agama kategori budaya kita. "

Poin Dumont tentang konsekuensi ideologis individualisme di Barat modern sama pentingnya dengan sehubungan dengan agama seperti halnya terhadap politik. Kita melihat agama sebagai salah satu di antara sejumlah sedekah yang kOrang lebih sama penting dan otonom, di mana politik dan ekonomi tampak paling besar. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, apa yang kita sebut agama mencakup seluruh masyarakat dengan memberikan nilai-nilai tertinggi yang menjadi acuan nilai dan norma "sekuler"; itu adalah domain

otoritas. Jadi, menyebut gerakan-gerakan ini sebagai "religius", kecuali jika istilah ini digunakan dalam arti luasnya, sama menyesatkannya dengan menyebut mereka hanya sebagai "politik".

Pertimbangan awal ini, mendefinisikan materi pelajaran kita dan mencoba untuk membedakan kategori rakyat kita sendiri dari orang-orang yang kita pelajari, timbul dari pertimbangan kembali apa yang dapat kita pelajari dari "filsafat politik" atau "teori sosial" dalam arti luasnya, sebuah peninjauan kembali yang saya pikir hanya pada awalnya. Tidak sulit untuk memahami mengapa perbedaan antara "agama" dan "politik" begitu sulit untuk ditarik.

Analisis telah bergulat dengan masalah dalam berbagai cara yang cerdas. Burrige, yang menekankan "proses penebusan" dalam gerakan, berpendapat bahwa batas itu tidak bisa dihindari karena kedua agama dan politik secara terpusat

memusatkan perhatian pada "kekuasaan". Shils (1968) berpendapat bahwa karena "ideologi berkaitan dengan otoritas, baik transenden dan duniawi," mereka hampir selalu "politis" dan, "apakah secara nominal agama atau anti-agama," ideologi selalu "peduli dan suci."

Dalam sebuah ringkasan perseptif dan kritik terhadap penelitian tentang gerakan keagamaan ribuan tahun, Yonina Talmon (1962) mencatat bahwa gerakan seperti itu sering dipandang sebagai pelopor dari organisasi politik sekuler dan sebagai "sekolah persiapan" bagi kaum revolusioner politik. Berawal dari kasus-kasus empiris dari sejumlah negara baru di Afrika dan Asia, Apter telah menggambarkan "agama politik di negara-negara baru" sebagai "bukan ideologi biasa" tetapi "kekuatan simbolis yang lebih kuat, kOrang rasional , meskipun itu mungkin termasuk tujuan rasional. "

Apter (1989) mengandalkan karya J. L. Talmon (1962) yang melacak asal-usul dan perkembangan, dalam pemikiran politik Barat, dari apa yang ia sebut "Mesianisme politik," yang menempatkan keniscayaan masyarakat masa depan yang sempurna dan menggantikan agama dengan politik, atau lebih tepatnya, memadukan keduanya.

III. Konsep Gerakan

Dalam pengertiannya yang paling umum, "gerakan" digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada ciri pembeda dari tubuh-tubuh yang terpisah, yaitu aksi propulsi. Karena tubuh adalah entitas yang berbeda, gerakannya memiliki properti "arah" relatif terhadap benda lain dan benda tidak bergerak. Kami membedakan antara benda-benda langit, yang kami pikir sebagian besar didorong oleh kekuatan diluar diri mereka (apakah

gravitasi atau tangan Tuhan), dan benda hidup, yang kami pikir didorong secara otonom, sebagian besar oleh kekuatan di dalam diri mereka.

Analisis gerakan sosial kadang-kadang menulis dalam bahasa yang menunjukkan kualitas determinasi gerakan astronomi, seolah-olah kekuatan vektor dari benda-benda eksternal mendorong tubuh gerakan, dengan medan gravitasi yang diatur oleh "massa" -nya sendiri, untuk bergerak ke arah tertentu. Biasanya, seperti asteroid, ia berakhir dalam sekejap meteor. Namun, sebagian besar ilmuwan sosial berbicara tentang tubuh sosial dari suatu gerakan seolah-olah itu adalah tubuh yang hidup, dipengaruhi oleh kekuatan eksternal tetapi mampu memiliki tingkat otonomi yang signifikan dalam menetapkan arahnya sendiri.

Sebagai contoh konstruksi budaya alternatif, saya mengutip konsep "gerakan" sebagai simbol

dalam budaya Orang Banjar. Tubuh digunakan sebagai simbol dalam budaya, tetapi biasanya tidak dipahami sebagai dibedakan menjadi "Akal" dan "Fikiran"; melainkan ditandai sebagai kesatuan fisiologis yang tidak berbeda. Membedakan tubuh manusia dari tipe tubuh generik lainnya adalah kemampuan untuk membedakan, khususnya antara perilaku "Amal" dan "Dosa".

Istilah Banjar yang paling sesuai dengan konsepsi kita tentang "gerakan politik" adalah *Baratif Baramal* menunjukkan karakteristik yang tampaknya sangat berbeda dari perspektif Barat: (a) gerakan atau agitasi, terutama dalam arti berayun bolak-balik atau berosilasi; (b) latihan, belajar, dan praktik berulang-ulang; (e) diskusi, kritik, debat, dan kontroversi. Jadi, alih-alih gagasan umum kita bahwa suatu gerakan adalah searah, (lebih disukai "maju") konsepsi Banjar menekankan pada gerakan yang memulihkan

situasi sebelumnya dan keterjajahan kelompok asing.

Baratif Baramal menempatkan disiplin dan rasionalitas dimana konsep kita mungkin menekankan semangat dan komitmen manusia dan ketuhanan suatu istilah yang saya pergunakan untuk mendeskripsikan bangkitnya politik kaum Sufi selain juga Gerakan Muning, Banua Lima, Perang Barito sebagai perlawanan yang dipengaruhi unsur-unsur Islam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa peserta dalam gerakan ini komitmen perlawanan sosial, tetapi itu " gerakan "dan *Baratif Baamal* adalah konsepsi yang terkait religiusitas. Ketika berbicara tentang" gerakan politik bernuansa simbolik agama" ada referensi implisit untuk tindakan umum sehubungan dengan badan sosial yaitu kesalehan . Ketika orang Banjar berbicara tentang

Baratif Baamal, rujukannya adalah pada tindakan Tubuh dan Batin manusia perorangan dan kelompok sehubungan dengan "Orang Banjar" dan wilayah kedudukannya yang terampas. Bahwa sebagian besar individu dari semua tujuan, "pembebasan banuanya dari keterjajahan bangsa lain.

Kembali pada pembahasan konstruksi kultural antropolog, analogi organisme yang menyamakan masyarakat dengan tubuh hidup dimana berbagai organ atau anggota harus melakukan "fungsi" mereka jika tubuh ingin tetap hidup telah menjadi pemikiran utama kita. Dari Durkheim hingga Radcliffe-Brown hingga saat ini telah digunakan secara teratur, biasanya disertai dengan peringatan tentang bahaya yang datang dari membawa analogi terlalu jauh. Wallace (1970) menggunakan analogi organismik untuk mengembangkan teori komprehensif untuk

"gerakan" yang paling akrab bagi para antropolog. Dia menyebut mereka "gerakan revitalisasi," dengan referensi eksplisit untuk upaya mereka menghidupkan kembali baik individu maupun badan kolektif. Dia mendefinisikan gerakan revitalisasi "sebagai upaya yang disengaja, terorganisir, dan disengaja oleh anggota masyarakat untuk membangun yang lebih budaya yang memuaskan".

Apakah sebuah gerakan itu dalam konteks budaya, sosial, atau pribadi ? -Tetapi yang pasti bahwa pendekatan yang umum dan netral pada pertanyaan apakah suatu gerakan tertentu dianggap sebagai agama, politik, atau ekonomi (meskipun ia menggunakan istilah "revitalisasi agama").

IV. MEMAHAMI GERAKAN OPOSISI ORANG BANJAR

A. Pendahuluan

Gerakan politik atas masyarakat Banjar tampaknya tidak dapat dipisahkan dengan kaitannya sebagai masyarakat Islam dan gerakan organisasi berbasis pendidikan terutama pendidikan Islam yang dikelola oleh individu atau keluarga-keluarga Banjar yang bertanggung jawab terhadap dimensi sosial dan dimensi religiusitas masyarakatnya.

Buku ini merupakan serangkaian refleksi atau bahkan mungkin sekedar sebuah perenungan panjang mengenai satu dari banyak soal yang sedang dihadapi oleh masyarakat Banjar. Terutama yang menyangkut persoalan kesejatan masyarakat, orientasi dan pemahaman politik, problematika demokrasi lokal maupun posisi nasional serta bagaimana konsep-konsep yang terjadi dan

menjadi bangunan penting masyarakat Banjar sebagai masyarakat kosmopolitan dalam kepolitikan nusantara yang heterogen yang secara khusus disebut-sebut sebagai lebih dekat dengan penghampiran budaya politik Melayu Islam.

Tentu saja untuk melakukan upaya rekonstruksi yang menyeluruh terhadap gagasan politik lokal itu, adalah sangat penting melakukan penelaahan kembali mengenai sepak terjang sejarah masyarakat Banjar beserta dinamika posisi dan peran pentingnya dalam pergulatan pemerintahan vis a vis negara, paling tidak dalam kontek ini adalah menemukan "*kancur jariangau-nya*", dengan perspektif masa lampau masyarakat Banjar yang mempunyai akar dan rantingnya sendiri.

Sangat menarik untuk merefleksikan bagaimana posisi masyarakat daerah Banjar yang penting ketika tahun 1956 pernah terbentuk apa

yang disebut sebagai "Dewan Banjar" dimana pada sebuah konferensi Kota Bandung terlibat wacana politik serius mengenai pertanyaan posisi Banjar dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia pasca Kemerdekaan beserta komunitas daerah-daerah lainnya.

Salah satu wacana politik itu bahwa Dewan Banjar mempunyai jawaban tersendiri tentang bentuk sebuah negara yang secara implisit disebut sebuah gugatan Dewan Banjar menuju bentuk negara yang ideal negara federasi.¹¹

¹¹ Ketika utusan "Dewan Banjar" menyampaikan resolusi kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik dengan sikap tegas tidak dapat menerima resolusi semacam itu, sekalipun Republik dapat menghargai usaha-usaha dari mereka yang mungkin dalam perjuangannya memihak kepada RI. Pada hakikatnya konferensi federal itu semata-mata ditujukan kepada pemerintah Belanda, dan bukan kepada RI, dan oleh karena itu, maka pengurus harian mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap "Dewan Banjar". (Republik Indonesia, Kalimantan, Kementerian Penerangan, Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan, Tahun 1953, halaman 72-77

Refleksi pemikiran mengenai posisi masyarakat Banjar terhadap negara, menjadi penting dan diperlukan karena dengan itu diyakini bahwa keterlibatan maupun keterkaitan dengan dinamika politik lokal terhadap sistem politik nasional menemukan kajian yang lebih komprehensif.

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, nampaknya ada semacam kekosongan dalam posisi Orang Banjar pada pentas politik nasional, sementara pada tataran panggung politik lokal belum adanya titik terang munculnya elite politik atau figur yang kuat dan mempunyai wawasan kosmopolitan dalam kapasitasnya sebagai agen of sharing of power terhadap pemerintah pusat atau negara.

Kekosongan posisi politik itu, selain disebabkan bahwa secara bertahap Orang Banjar "meninggalkan gelanggang" , tetapi juga pada sisi lain belum ada tokoh yang masuk dalam sistem

kekuasaan negara sehingga peran kunci kekuasaan pusat terhadap daerah masih mengikuti "arus besar" kepentingan pusat untuk menguasai daerah. Inilah yang merisaukan banyak kalangan sebagai terjadinya kelangkaan kepemimpinan dalam perspektif politik masyarakat Banjar di pusat-pusat kekuasaan.

Kebutuhan untuk memikir ulang strategi dalam struktur posisi politik orang Banjar dalam politik lokal maupun nasional, mungkin dapat juga dipandang sebagai sebuah sintesa dalam dialektika tentang perubahan apa dan bagaimana masyarakat Banjar yang tentu saja merupakan bagian konstruktif dari sebuah gagasan menuju Rethinking of Banajarese political cultur yang salah satunya dapat dilalui dengan transformasi cultural masyarakat Banjar masa depan.

B. Masyarakat Pesisir dan Etos Kesalehan Ekonomi

Komunitas sosial dan kapasitas sosial masyarakat Banjar, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio budaya dan religiusitas Islam Banjar yang telah berlangsung lama. Masyarakat Banjar yang kosmopolit sebagaimana juga yang terjadi pada masyarakat Aceh, Makasar Riau, Palembang, Maluku Islam dan seterusnya adalah sangat mungkin karena keterkaitan faktor geografis sebagai masyarakat dengan kriminalitas identifikasi masyarakat pesisiran, yang tentu saja bahwa budaya masyarakat pesisir adalah budaya kosmopolitan.

Sejumlah rujukan tentang komunitas masyarakat yang mendiami wilayah pesisir akan ditemukan adanya struktur sosio budaya yang mempunyai interaksi dan jaringan hubungan antar wilayah lokal, regional dan internasional yang

intens, dimana telah terjadi saling pertukaran budaya, pemikiran dan pemahaman diantara komunitas-komunitas masyarakat setempat dengan masyarakat di dunia luar.

Kajian yang cukup representatif tentang keberadaan orang-orang Melayu kosmopolitan itu misalnya ditemukan dalam apa yang disebut sebagai kebangkitan arus besar intelektualisme Melayu Islam Asia Tenggara di kawasan Timur yang kemudian akan terungkap adanya pergeseran dalam corak pemikiran keagamaan di banyak daerah pesisir itu.

Dalam beberapa abad, pusat perbincangan tentang Orang Banjar terutama dengan munculnya pemikiran revolusioner dalam bidang syariah dan fiqh sebagaimana ditemukan dalam karya besar Syekh Muhammad Arsyad Al Banjar dengan Sabil al Muhtadin maupun kitab Darun Nafis Pengeran Syekh Muhammad Nafis. Gerakan pembaharuan ini

tentu saja mempunyai pengaruh dan mewarnai prinsip-prinsip pemikiran dan orientasi atau pemahaman masyarakat Banjar terhadap dinamika kehidupan.

Gerakan pembaharuan masyarakat Banjar melalui teksbook Sabil al Muhtadin maupun Darrun Nafis dalam kosmopolit itu sebagaimana juga kita temukan basis pembaharuannya di pesisir Palembang melalui abd al Samad al Palimbani, Nawawi al Bantani maupun Ahmad Khotib al Minangkabawi.

Akan tetapi tentu saja bahwa sejarah masyarakat Islam Banjar dalam interaksinya dengan dunia luar masih memiliki Citra dalam, bangunan masyarakat lokalnya mempunyai kultur tersendiri. Samuel Bryan Scott (1913) misalnya menyebutkan organisasi budaya/adat lokal vis a

vis gerakan pembaharuan Islam dalam penyebaran Islam di Kalimantan.²²

Argumentasi Scott (1913) yang kemudian diikuti oleh Azra (1999) bahwa kekuatan ekonomi merupakan pembawa Islam ke Kalimantan. Hampir seluruh historiografi awal Islam Nusantara menampilkan riwayatnya tentang kedatangan pada guru-guru pengembara yang kemudian mengIslamkan para penguasa setempat yang kemudian diikuti oleh rakyat mereka.³³

²² Kajian yang cukup komprehensif tidak hanya tentang penyebaran Islam di Kalimantan secara keseluruhan, tetapi juga mengenai bagaimana interaksi dan modifikasi-modifikasi yang terjadi terhadap Islam, ketika agama ini menyebar dan masuk ke dalam kelompok etnis dan budaya lokal, khususnya Melayu dan Dayak di Kalimantan, Azyumardi Azra, 1999, pp 230-231

³³ Gazali Usman menulis bahwa dalam membahas politik perdagangan kerajaan Banjar, Supremasi Demak tahun 1526, adalah hal penting, mengingat peran Demak dalam penyebaran Islam di Banjarmasin, dari pengaruh Hindu menjadi sebuah Kerajaan Islam. Dibawah Sultan Suriansyah batas kerajaan diperluas meliputi Batang Tabalong, Batang Balangan, Alai, Amandit, daerah ini semula dikuasai Pangeran Tumenggung yaitu paman Sultan Suriansyah sendiri. Gazali Usman, 1994 p 68

Sejauh argumentasi yang menyeluruh terhadap lokalitas terutama modifikasi dalam tatanan kekuasaan dan konflik yang menyertai dinamika kekuasaan itu dikarenakan politik akomodasi nampak tidak berjalan mulus sebagaimana yang dicatat oleh Helius Syamsuddin (1991) ketika Sultan Demak membantu Pangeran Samudra untuk menundukkan pamannya Pangeran Tumenggung, perebutan kekuasaan politik yang dimenangkan oleh Pangeran Samudra itu dengan “harapan” masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah, Sultan pertama di Banjarmasin yang Islam. Islamnya kerajaan Banjar diikuti oleh masyarakatnya.⁴⁴

Pemahaman terhadap masyarakat Banjar fase awal nampak tidak masih mempunyai garis

⁴⁴ Helius Sjsamsuddin, *Islam and Resistance in South and Center Kalimantan in the Nineteenth and Twentieth Century*, dalam MC. Ricklefs (ed) *Islam in The Indonesian Socuial Context*, Clayton, Monash University, 1991

persinggungan dengan realitas kehidupan dalam kontek sosial budaya dan adat istiadat yang menyertainya sebagaimana dilaporkan oleh Amir Hasan - Kiai Bondan (1953) , Tjilik Riwut (1979) Alfani Daud (1997) atau Noried Haloi Radam (1984). Oleh karena itu dualisme dalam pemahaman dan orientasi cultural itu mungkin akan mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam metafora yang lebih luas.

Basis pemikiran dan cara pandang masyarakat yang bersangkutan paut dengan dua arus besar pemikiran itu, acap kali berpengaruh pada orientasi pemahaman dan perilaku terutama terhadap paham kekuasaan menurut masyarakat Banjar. Konsep-konsep "Mangaji Kataguhan" yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kontek supra adat bersifat fisik akan berhadap hadapan dengan

konsep "Mangaji Kitab" yang lebih bersifat religius non fisik.⁵⁵

Jikalau dualisme orientasi dan pemahaman itu mempunyai kaitan dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat Banjar, maka adalah sangat mungkin bahwa orientasi dan pemahaman politik kontemporer masyarakat Banjar sekarang telah mengalami distorsi bahkan mungkin dianggap sebagai tidak mengalami kemajuan yang cukup penting dalam mentransformasikan nilai-nilai dan penolakan terhadap prinsip kosmopolitannya sendiri.

Dengan mendasarkan diri kepada keberadaan supra adat yang dipercayai, sementara kekuatan sosio ekonomi berada dibalik kekuatan yang lain, peta politik Orang Banjar mengalami

⁵⁵ Dalam pemilihan kepala daerah misalnya perbincangan sekitar bantuan kekuatan supranatural ini sebagaimana dilaporkan oleh kalangan wartawan lokal, sangat mungkin dipengaruhi oleh dualisme orientasi Orang Banjar terhadap kekuasaan politik dan cara-cara yang digunakan untuk memupuk kekuasaan (power) itu.

banyak pergeseran dari perjuangan nilai ideologi fase awal (teksbook syariah dan fiqih Islam) kearah yang nampak lebih pragmatis (teksbook ekonomi dan kekuasaan).

Dalam pandangan masyarakat Banjar salah satu ukuran keberhasilan dan kesejahteraan adalah kesanggupan menunaikan ibadah haji, tidaklah lengkap kesadaran social kalau tidak diikuti oleh simbol ekonomi dengan melakukan ibadah sebagai sebuah kemapanan. Etos kerja masyarakat Banjar dalam kontek ini dipandang sebagai sebuah etos kerja karena prinsip kesalehannya terhadap Islam, bekerja mencari penghidupan adalah ibadah dan puncak penghidupan itu adalah menunaikan Ibadah haji.

V. KONFLIK AGRARIA DAN GERAKAN SOSIAL ORANG BANJAR

A. Petani dan Konflik Agraria

Sebagaimana halnya dengan konflik agraria di Indonesia lainnya, perlawanan petani di Hantarukung Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian perlawanan petani terhadap modernisasi atau revolusi hijau yang dilakukan pihak kolonial. Terutama ketika format produksi kapital mengalami perkembangan pesat. Memosisikan rakyat sebagai buruh (koeli) di satu sisi berhadapan dengan pemilik modal swasta di sisi yang lain sehingga menimbulkan konflik-konflik agraria yang bersifat struktural.

Penguasaan alat produksi (irigasi pengairan) ke tangan pemerintah kolonial yang dilakukan dengan cara pengambilalihan secara paksa dalam penguasaan tanah dari para petani atau wilayah kerajaan sehingga terjadi polarisasi *sistem upahan*.

Konflik mengandung banyak arti sebagai pertentangan dua pihak atau lebih atas pertentangan kepentingan, kebencian, kecurigaan dan dominasi oleh kekuatan kepada pihak yang lemah.

Konflik agraria pertama di Hantarukung (1899) Kalimantan Selatan, dianggap sebagai terjadinya penguasaan wilayah agraria oleh penguasa kolonial dengan pemaksaan alat produksi dan pembuatan irigasi sehingga memposisikan penduduk setempat sebagai buruh atau *Koeli Kontrak*. Perlawanan petani itu juga diikuti dengan pembangkangan dalam pemungutan pajak. Ada kemungkinan bahwa perlawanan petani di Hantarukung juga disebabkan adanya sistem monopoli perdagangan oleh pemerintah kolonial sehingga para petani dan para Sultan kehilangan eksistensinya terhadap sistem pertanian atau tanah.

Alasan perlawanan yang dikemukakan bahwa penduduk tiga kampung itu tidak bersedia melakukan kerja rodi menabuk sungai antara sungai Amandit dan sungai Negara. Selain itu mereka menyatakan juga tidak bersedia lagi membayar pajak. Sikap penduduk dan tindakan Penggerak Yuyu yang tidak mau menurunkan kuli untuk menggali garis, ia kemudian dilaporkan oleh Pembakal Imat ke Kiai karena yang bersangkutan tidak ditempat, Pembakal melaporkan pada Kontoler Belanda di Kandangan.

Penguasa kandangan sangat marah mendengar berita itu, pada 18 September 1899 berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri Controleur Adsenarpont Domes dan Adspirant K Wehonles chen beserta 5 orang lainnya. Sampai di Hantarukung. Setelah terjadi tanya jawab, tiba-tiba muncul ratusan penduduk

dibawah pimpinan Bukhari^{65.1} dan santar sambil mengucapkan "Salawat nabi" maju kearah Controleur dengan senjata tombak, sarapang dan lainnya. 18 September 1899 terkenal dengan nama Pemberontakan Hantarukung.⁷⁶

Implikasi konflik petani dalam sistem agraria yang dibangun oleh pemerintah kolonial , bahwa tekanan terhadap petani di Kalimantan Selatan semakin menguat. Usman (1994) selanjutnya melaporkan bahwa pada 19 September 1899 pasukan Belanda melakukan tindakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan itu dipimpin oleh Kiai Jamjam putra daerah yang diperkuat oleh 2 kompi serdadu Belanda. Pembersihan terhadap para pemberontak

^{65.1} Bukhari lahir di Hantarukung tahun 1850, mengikuti pamannya Kasim yang menjadi Punakawan Sultan Muhammad Seman. Sultan menjadikan Bukhari ikut berjuang di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah ia dipercayai sebagai Pelayung Istana.

⁷⁶ HA.Gazali Usman, Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam, Lambung Mangkurat University Press, 1994 pp 272 273

terus dilakukan, sehingga konflik Agraria itu menjadi tidak seimbang. Van Vollenhoven (dalam Burger, 1960; 130, Endang Suhendar, 1998; 46) melihat bahwa tekanan pajak yang semakin berat memperbesar utang rakyat yang harus dibayarkan kepada raja sehingga berakibat terlepasnya hak-hak rakyat atas tanah secara paksa.

Kasus Pemberontakan Hantarukung merupakan salah satu sejarah resistensi Orang Banjar dalam penolakan yang kuat terhadap, sebagaimana kita temukan dalam perlawanan petani dalam konflik agraria di daerah lain. Resistensi petani yang merasa terancam, menimbulkan kesan bahwa sejarah perlawanan Orang Banjar atas penguasaan tanah atau perampasan *pahumaan nini data* sampa pentingnya dengan pemberontakan petani Banten 1888 dalam kajian Sartono Kartodirdjo (1984).

Paling tidak identifikasi Amuk Hantarukung sebagai kajian berharga untuk memahami politik non kooperatif Orang Banjar terhadap pemerintah yang dianggap zalim. Situasi kebijakan agraria Hindia Belanda sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 sampai 1920 itu oleh Van Vollenhoven disebut sebagai "setengah abad ketidakadilan".

B. Organisasi Politik Basis Agama

Persinggungan Orang Banjar dalam organisasi modern dapat dilacak dari catatan Amin Hasan-Kiai Bondan (1953) tentang gerakan organisasi sosial, politik dan ekonomi di Kalimantan Selatan yang dimulai tahun 1901 ketika untuk pertama kali berdiri Perkumpulan Seni Budiman (PSB) di Banjarmasin yang dipandang cukup modern karena ada manajemen dan tujuan yang jelas di bidang pendidikan.

Tabel 1
Organisasi Kerakyatan Kalimantan Selatan 1901 - 1931, "Amir Hasan - Kiai Bondan" Suluh Sejarah Kalimantan (1953)

No	Nama Organisasi	Tempat-Tahun	Pelopor	Pendekatan
01	Perkumpulan Seri Budiman	Banjarmasin, 1901	Kiai Bondan	Pendidikan
02	Perkumpulan Budi Sempurna	Banjarmasin, 1904	Kiai M Djamjam	Pendidikan
03	Sarekat Islam	Banjarmasin, 1912	A.Arip, Tirtodiredjo, Sastrokardono	Kebudayaan
04	Sarekat Harta	Banjarmasin, 1920	A Sangaji, Kiai Kedak, Amir Hasan	Kebudayaan
05	reesgezelschap (taman pema	Banjarmasin, 1923	Rusma, GT. Tjitra Kumala Adjaib, An	Politik
06	Borneo Konferensi	1924	Hasan, Mas Abi, Abdullah	Politik
07	Muhammadiyah	Alabio, 1925	Horsman Babu	Pendidikan
08	Persatuan pemuda Marabahan	Marabahan, 1923	HM. Djapri	Pendidikan
09	Persatuan Patera Barabai	Barabai, 1923	M. Ruslan	Ekonomi
10	Persatuan Putera Borneo	Banjarmasin, 1929	H. Hasan Basri	Ekonomi
11	Sarekat Kalimantan	Marabahan, 1930	Abdul Kadir, Hasim, M. Ramli	Politik
12	(fusi Persatuan Pemuda Marabahan)	Banjarmasin, 1929	Ketua Pedoman Besar	Politik
13	Persatuan Bangsa Indonesia (partai Dr Soetomo)	Banjarmasin, 1931	HM. Arip	Pendidikan
14	Musjawaratottholibin Nahdlatul Ulama	Banjarmasin 1931	Merah Djohansyah	Agama

Nampaknya bahwa selama 30 tahun (1901-1931) berdirinya organisasi kerakyatan di Kalimantan Selatan, cukup memberikan kontribusi terutama terhadap pergerakan lokal dan nasional. Meskipun tidak ada penjelasan yang cukup kuat dan memadai terhadap bagaimana pengaruh dan peran organisasi pergerakan itu sebagaimana peran dan posisi Sarekat Islam (SI) atau Budi Oetomo (BO) dalam tataran ideologis gerakan dengan mengambil setting basis kerakyatan.

Mengapa misalnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Soekarno dalam argumentasi Amir Hasan-Kiai Bondan mendapat kesan seolah-olah sebagai organisasi yang "membahayakan" sehingga misalnya eksistensi organisasi Barisan Indonesia (Bindo) yang dianggap pro PNI mendapat pengawasan ketat dari penguasa Banjarmasin⁸⁹. Argumentasi yang mungkin saja merupakan

⁸⁹ Banjarmasin pada waktu itu berstatus Karisedenan

implikasi politik dari pergulatan Indonesia menuju tercapainya ideologi negara yang dicita-citakan atau dalam apa yang disebut sebagai situasi bergolaknya *politik aliran*.

Penjelasan yang agak resmi dan memiliki cukup instrumen dalam memberikan warna kepada kehidupan sosial dan politik lokal selain organisasi Muhammadiyah di Alabio Hulu Sungai Utara sebagaimana penelitian Ahmad Fediani Saifuddin dalam Konflik dan Integrasi, adalah peran penting gerakan berbasis media massa.⁹⁷

⁹⁷ Surat kabar dan majalah yang pernah terbit di Kalimantan adalah; Suara Borneo, Pewarta Borneo, Sinar Borneo, Pengharapan, Bintang Borneo, Borneo Post, Malam Djumaat, Suara Kalimantan, Bingkisan, Kesadaran Kalimantan, Express, Pantjangan Warta, Jtanang, Utusan Kalimantan, Pembangun Semangat, Semarak, Sit Po, Suara Hulu Sungai, Perintis, Suara pakat dayak, Pemuda Muslim Mulo. Amir Hasan Kiai Bondan, 1953,p187

C. Revitalisasi Islam: Pengaruh Timur Tengah dan Jamaah Haji

Sebagai masyarakat kosmopolitan yang mempunyai banyak jaringan dan intensitas interaksi dengan dunia luar, menukan masyarakat Banjar dalam pertalian bidang pendidikan agama yang berasal dari pusat-pusat pendidikan Timur Tengah terutama Mesir (Universitas Al Azhar) dan seterusnya.

Apa yang terjadi pada tahun 1880 an terhadap gerakan organisasi keagamaan dan pendidikan di Kalimantan Selatan, nampak belum mengambil peran yang cukup penting terutama dalam proses membangun akar bagi mekanisme pendidikan terhadap rakyat. Tetapi kemungkinan bahwa tahun 1880 an merupakan tahun kesejahteraan masyarakat Banjar artinya bahwa dinamika perekonomian dan perdagangan masyarakat Banjar yang berhasil itu

memungkinkan pengiriman pemuda-pemuda Banjar untuk menuntut Ilmu di pusat pendidikan agama Timur Tengah. Sebagaimana yang ditemukan pada ulama besar Muhammad Arsyad al Banjari dan Muhammad Nafis al Banjar kedua tokoh berpengaruh ini merupakan cahaya Islam di Kalimantan Selatan. Kemakmuran rakyat Banjar dibuktikan lagi dengan banyaknya jumlah jamaah haji asal Banjar dibandingkan dengan daerah Islam lainnya.

Administrator Kolonial Anderson tahun 1850 mencatat jumlah jamaah haji asal Banjar adalah terbanyak di seluruh Nusantara, menurut catatan Anderson ada sekitar antara 100-200 orang per tahun jamaah Kalimantan. Selatan yang menunaikan Haji, suatu jumlah yang sangat besar di jalannya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999 pp 261-263

Menurut Azra (1999) bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam perkembangan dan dinamika Islam terutama aspek pendidikan tidak menemukan hal yang sama dengan apa yang terjadi di Jawa Barat, dimana konsolidasi pendidikan menjadi sangat intens sebagai pengaruh kuat dari kosmopolitan masyarakat pesisirnya. Gerakan pembaruan Islam tidak berhenti pada kontek syariah dan fikih tetapi mengokohkan semangat gerakan dalam konsolidasi bidang pendidikan.

VI. RESISTENSI DAN GERAKAN OPOSISI Orang BANJAR

A. Ibnu Hadjar : Pejuang *Mujahidin*

Sampai menjelang tahun 1959, keinginan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia menjadi cita-cita utama perjuangan organisasi-organisasi Islam. Sementara romantisme Soekarno tentang revolusi Indonesia sebagai "yang belum selesai" telah mendapat penentangan yang hebat dari kalangan organisasi Islam radikal.

Pertentangan antara tokoh dan konflik dalam memperjuangkan ideologi negara mencapai anti klimak dalam apa yang lebih dikenal dengan gerakan *Darul Islam* di Jawa Barat setelah peristiwa proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 7 Agustus 1949 di Kampung Cisampang, desa Cidugaleun, kecamatan Leuwisari Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang mantan ketua PSII Iman Sekarmadji Maridjan

Kartosowirjo.¹¹¹⁰ Menyusul pada tahun 1953 pemberontakan Darul Islam pimpinan Tengku Muhammad Daud Beureueh di daerah Aceh. Pemberontakan DI/TII Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 1953.

Abdurrahman (1998) merefleksikan pergolakan dalam prinsip ideologi negara dalam kondisi semakin melebarnya pemberontakan di daerah-daerah dengan basis Darul Islam. Di Kalimantan Selatan yang kemudian dikenal dengan "Pemberontakan" Ibnu Hadjar.

Meskipun telah banyak analisis sejarah dengan beberapa alasan yang melatar belakangi "pemberontakan" Ibnu Hadjar, karena masalah-masalah ketidakpuasan berkenaan dengan jabatan

¹¹¹⁰ Kritik Sukarno terhadap SM Kartosuwirjo dapat dilihat dalam pidato 17 Agustus 1960 "Laksana Malaikat Yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita". Saudara-saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Kartosuwirjo dulu? Untuk membuat landasan bagi proklamasi daripada ia punya NII (negara Islam Indonesia), ia lebih dulu mengatakan bahwa Revolusi Indonesia gagal.

kemilterannya yang kemudian mengadakan perlawanan dengan membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia Yang Tertindas (KRIYT), yang merupakan reaksi terhadap besarnya campur tangan pemerintah pusat terutama sekali oleh perwira-perwira yang berasal dari Jawa.¹²¹¹

Cornelis. Van Dijk (1995) menyebut bahwa selain kekecewaannya terhadap para perwira militer yang ditugaskan di Kalimantan Selatan, kekecewaan *Ibnu Hadjar* juga disebabkan adanya semacam intervensi etnis, sebagaimana tuntutan yang kemudian tidak pernah dipenuhi untuk dilakukan "rasionalisasi" para militer Kalimantan Selatan.¹³¹² *Harian Nusantara* yang terbit tanggal

¹²¹¹ Abdurrahman (1998;5) Peristiwa Amuntai 1953 dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Politik di Indonesia.

¹³¹² Keberangkatan Hassan Basry (disekolahkan ke Mesir) yang tidak akan berada di Banjarmasin sampai Desember 1955- memperkuat kecurigaan, kalangan penguasa militer berusaha menggerogoti pengaruh bekas ALRI Divisi IV dengan menceraiberaikan anggotanya. Selanjutnya hal ini mengukuhkan Ibnu

30 September 1950 menurunkan berita, kebencian terhadap pengangkatan orang Jawa pada jabatan-jabatan pemerintah terasa tidak hanya di Hulu Sungai atau oleh Ibnu Hadjar dan pengikutnya saja. Residen Kalimantan Barat - dalam memberikan pendapat tentang ketegangan disana - menyatakan pada bulan Agustus - dia menolak menghentikan impor pegawai negeri dari Jawa karena dia ingin membentuk aparat pemerintahan daerah dan angkatan kepolisian daerah yang mampu.

Apakah fenomena pemberontakan Ibnu Hadjar dapat dipastikan karena alasan kekecewaannya terhadap "jabatan militer" yang tidak proporsional. Nampaknya catatan untuk menjelaskan hubungan ini memerlukan analisis dan penafsiran yang lebih adil terutama jikalau

Hadjar dan pemberontak-pemberontaknya dalam keyakinan, mereka yang telah mengorbankan diri untuk perjuangan Republik Indonesia di Kalimantan selama revolusi kini ditempatkan di kedudukan bawahan. Semua ini menimbulkan yang disebut "gerakan anti-Jawa". (Van Dijk, 1995;233)

mengamati pertahan SM Kartosuwiryo, Daud Beureueh, Abdul Kahar Muzakar dan Ibnu Hadjar dalam tiga perspektif Pertama; menyangkut ketegangan ideologi, Kedua; penekanan pemerintah pusat terhadap daerah dan Ketiga; trauma kekecewaan daerah yang dianggap sebagai langkah "makar" terhadap republik 17 Agustus 1945.

Nazaruddin Sjamsuddin (1990) menyebut Ibnu Hadjar – Menteri Negara dalam Kabinet NII yang bersifat Presidensial di Aceh sebagai pemimpin Darul Islam di Kalimantan. Dalam, Catatan Sjamsuddin misalnya pada Januari 1955 Darul Islam Aceh telah berhasil menyusun Kabinet NII yang menempatkan Ibnu Hadjar sebagai Menteri Negara.

Implikasi politik nasional dalam suasana ketegangan ideology dengan mengasumsikan gerakan proses daerah sebagai "pembangkangan"

merupakan langkah-langkah represifitas negara yang bernaung di bawah kekuatan Ideologi dan mematikan aspirasi politik yang berkembang di daerah dalam bayang-bayang revolusi yang selalu didengungkan sebagai "belum selesai". Pandangan negara integralistik Soepomo nampaknya sebangun dengan kebijakan politik non akomodatif itu seperti itu.

SUSUNAN KABINET NII PRESIDENSIL DI ACEH

Presiden	Menteri Keuangan
Iman SM. Kartosuwirjo	Udin Kartasasmita
Wakil Presiden	Menteri Pendidikan
Daud Beureueh	Tengku Nyak Tjut
Menteri Pertahanan	Menteri Kehakiman
Pak Oetji	Chaeduddin
Wakil Menteri Pertahanan	Menteri Penerangan
Abd Kahar Muzakkar Wak	Luqman
Menteri Pertahanan II	Menteri Sosial
Al Murthola	Sanusi Partawijaya
Menteri Luar Negeri	Menteri Negara
Hasan Ali	Ibnu Hajar
Menteri Dalam Negeri	Duta PBB
I Huda	Hasan M. Tiro

Ada semacam *stigma politik* yang dilamatkan oleh pemerintah pusat yang mengusung Ideologi Nasionalis dan *Revolusi yang Belum Selesai* terhadap “*pemberontakan*” *Ibnu Hadjar* Kalimantan Selatan dan *SM. Kartosuwirjo* Jawa Barat, *Daud Beureueh* Aceh dan *Abd. Kahar Muzakar* di Makassar yang mempunyai ide-ide kosmopolitanisme terutama Islam vis a vis ideologi Pancasila yang lebih bersifat nasionalisme keIndonesiaan dan dipandang sekuler.

Pejuang *Ibnu Hadjar* sebagai teksbook sejarah lokal telah memberikan gambaran yang agak lengkap mengenai bagaimana sikap *Orang Banjar* dalam kesetiaanya mempertahankan kesabaran dan tanggung jawab terhadap negara dan tugas moral yang diberikan kepadanya terutama dalam mempertahankan apa-apa dalam kepercayaan dan pengalaman religiusitasnya dianggap sesuai tuntunan dan ajaran. Surat kabar

Indonesia Merdeka 6 Januari 1953 misalnya melaporkan tentang orang-orang desa yang mengabaikan sembahyang didenda Rp 900 sampai Rp 1000 untuk menunjukkan betapa keinginan menegakkan agama ingin dilakukan.

B. Hassan Basry : Episode Kaum Republikan

Seperti halnya juga daerah-daerah lain, bagian penting perjuangan kemerdekaan di Kalimantan dimainkan oleh para emigran ke Jawa yang kembali ke daerah asalnya pasca proklamasi 1945. Di Jawa orang-orang Kalimantan terpusat di Pantura dan pusat-pusat dagang tradisional terutama Tuban dan Surabaya (Dijk:95.206)

Para pemuda Kalimantan yang kemudian bergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI), yang terdiri dari 250 orang termasuk beberapa orang diantaranya yang kemudian segera menjadi pemimpin gerilya seperti Hassan Basry,

Gusti Aman, Firmansyah, Darmansyah dan Husin Hamsyah. PRI cabang Klimantan (PRIK) mengambil langkah dengan mengirimkan tujuh anggotanya dalam sebuah ekspedisi pimpinan Hassan Basry seorang Guru Agama Muslim di Ponorogo asal Kandangan. (KB.Dijk,59,206)

Hassan Basry meninggalkan Surabaya pertengahan Oktober 1945 dengan membawa perintah dari Tentara Republik untuk membentuk organisasi gerilya di Kalimantan Selatan. Setibanya di Banjarmasin, suasana sangat sulit karena terjadinya penangkapan terhadap pemuda-pemuda Republik. Beberapa pemuda yang lolos dari pengejaran kemudian lari ke pegunungan Meratus sekitar Kandangan termasuk Hassan Basry dan berhasil membentuk *Lasykar Saifullah* kemudian organisasi lapis kedua Banteng Indonesia. (Nasution. Dijk.95;207)

Kelompok ketiga yang mengatur ekspedisi pejuang perlawanan ke Kalimantan ialah Ikatan Perjuangan Kalimantan yang bermarkas di Surakarta. Umumnya dikenal sebagai Sabili'llah Kalimantan, diketuai Gusti H.Muis (nasution, 1977 H:470-473; Dijk;1995;207)

Di Kalimantan Selatan organisasi perjuangan dan gerilya yang dilakukan oleh PRI Pesindo Kalimantan dan MN.1001 dibawah koordinasi Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV yang terbentuk pada 4 April 1946. (Dijk;1995;208)

Dengan izin markas besar Angkatan Laut, suatu komisi persiapan khusus segera mulai membentuk organisasi baru yang diusulkan oleh sebuah panitia kecil yang terdiri dari Muhammad Noor, Gusti Muis, Achmad Jusuf, Rezekan dan Hasim Amin. Usaha itu mencapai puncak pada pelantikan secara resmi ALRI Divisi IV di Malang.

Markas besar pertama di lawang, kemudian Mojokerto dan Tuban.

Dengan tujuan pencapaian koordinasi yang sama di Kalimantan sebagaimana di Jawa, didirikan Gerakan Rahasia yang dipimpin A. Zaidi dari ALRI Divisi IV. Gerakan Rahasia ini mengirimkan utusan dengan anggota Asli Zuchry dan Mursyid Seman dan berhasil menemui Hassan Basry yang waktu itu masih menjadi kepala Banteng Indonesia di Desa Tabihi Kiri Kandangan.

Dalam pertemuan dengan itu Hassan Basry menyetujui usul-usul dari Jawa karena itu Gerakan Rahasia ALRI Divisi IV secara resmi dibentak dalam suatu upacara singkat pada 18 November 1946 yang bermarkas di Padang Batung yang kemudian diberi nama baru Kota Seribu Jaya. Pembantu Utama GR ALRI Divisi IV diantaranya adalah *Alihamdi Budy Gawis* sebagai Kepala Departemen

Pejuang dan *Daeng Lajida* sebagai Kepala Keamanan (Musaffa 1954;n2. Dijk;1995;209).

Komunikasi dengan markas di Jawa terputus, Hassan Basry dan kawan-kawan sebenarnya bertindak berdasarkan kekuasaan mereka sendiri tanpa perintah dari Jawa, sampai markas besar di Jawa dibubarkan, Hassan Basry tetap tidak diberi tahu dengan kenyataan yang terjadi.

ALM Divisi IV Pertahanan Kalimantan mendapatkan dua organisasi gerilya lain *MN.1001 dan Mandau Telabang* Kalimantan Indonesia (MTKI) yang setuju bergabung dengan Hassan Basry. Diantara orang yang cukup berjasa dalam perjuangan organisasi ALRI Divisi IV Kalimantan adalah Gusti Aman sebagai wakil komandan ALRI Divisi IV (Musaffa 1954:n.2,Dijk;1995;209).

Sesudah *Gusti Aman* dan seorang sahabatnya *P Arya* turut bersama gerilya di Hulu Sungai, struktur ALRI Divisi IV diperbaharui. *Gusti Aman* disebut-sebut sebagai organisator yang baik dengan aktif membuat pangkalan gerilya sekitar Martapura. Selanjutnya melempangkan jalan bagi terbentuknya Pemerintahan Militer Kalimantan Selatan Pusat (PMKSP), guna tujuan ini diadakannya pertemuan khusus pemimpin-pemimpin gerilya di *Telaga langsung* yang dihadiri antara lain *Aberani Sulaiman*, *Damanhuri* dan *Daeng Ladjida*. Bertanggung jawab demi keamanan pertemuan ini adalah *Ibnu Hadjar*. (Dijk, 1995;210)

Pemerintah Militer Kalimantan Selatan Republik diumumkan Hassan Basry 17 Mei 1949, lebih seminggu sesudah penandatanganan persetujuan *Van Roem Royen*. Dengan demikian proklamasinya merupakan protes terhadap pengakuan terhadap daerah otonom Kalimantan

Tenggara dan Banjar (Otonomi Banjar meliputi Hulu Sungai dan Banjarmasin). Gubernur Militer Hassan Basry Kepala Staf Militer Aberani Sulaiman Kepala Departemen Ketataprajaan Kepala Departemen Urusan Umum Wakil Kepala Departemen Urusan Umum Kepala Departemen Keuangan dan Departemen Kemakmuran Menteri Persenjataan Kepala Departemen Penerangan dan Departemen Agama, Kepala Departemen Pertahanan dan Pasukan M.Hammy, sesudah itu terjadi pola-pola manajemen organisasi militer dengan menerapkan pola perwilayahan yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan. (Musaffa,1954,Nasution,1971,Dijk;1995;210-211).

Sampai akhir 1948 ALRI Divisi IV telah tumbuh menjadi apa yang dilukiskan residen Kalimantan sebagai suatu tentara modern yang lengkap persenjataannya. ALRI tidak hanya memungut pajak (pajak atas penjualan latek dan

pajak pendapatan) tetapi juga menguasai arus barang, berhasil mengoyak pemerintahan daerah otonom Banjar dan merintanginya bekerjanya Dewan Banjar (sebuah organisasi semi parlemen) dengan mendesak anggotanya untuk meninggalkan “*Sandiwara Bikinan Belanda*”. Dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Berikutnya mereka menyatakan Dewan Banjar, Dewan Dayak Besar dan Dewan Kalimantan Tenggara, bubar dan digantikan. Komite-Komite Nasional Indonesia (KKNI). Komite Nasional Indonesia Banjar diketuai oleh Burhanuddin (Kalimantan Berjuang,11;7;1949, Musaffa, 1954 n.5; Dijk,1995;214-215).

Sampai menjelang tahun 1949 terjadi "Aksi Boikot" terhadap pemerintahan Belanda maupun para pegawai yang bekerja di organisasi Belanda yang telah menyebar di seluruh daerah. Pada 16 September lebih dari 150 pekerja kantor dan buruh di Hulu Sungai yang bekerja untuk

pemerintah Kolonial di Kandangan, Rantau dan Negara mengeluarkan pernyataan sikap : Akan meninggalkan setiap kantor dan perusahaan yang menghalangi perjuangan kemerdekaan dan baru akan kembali bekerja setelah Konferensi Meja Bundar selesai dilaksanakan (Dijk;1995;216-217).

Segera sesudah pembentukan Pemerintah Militer 17 Mei 1949, timbul perbedaan pendapat antara Hassan Basry, Pemerintah Republik dan Pemerintah Belanda Pertentangan terjadi karena gencatan senjata yang disetujui antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Belanda yang dimulai 1 Agustus sebagai pelaksanaan lanjutan dari persetujuan Van Room Royen baik persetujuan ini maupun gencatan senjata pada hakikatnya adalah persetujuan RI dengan wilayah di bagian-bagian Jawa dan Sumatera dengan Belanda.

Walaupun negara-negara lain dan daerah-daerah Otonomi yang akan merupakan bagian dari

RIS diwakili oleh badan khusus yang mereka bentuk *Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)*. Atau *Pertemuan Permusyawaratan Federal*. (Dijk;1995;218)

Hassan Basry menolak kekuasaan Republik, karena menganggap bahwa Kalimantan Selatan harus mendapat perlakuan yang sama dengan wilayah-wilayah Republik di Jawa dan Sumatera. Hassan Basry mendesak agar gencatan senjata untuk Kalimantan dicapai melalui perantaraan *Center Joint Board (Pimpinan Bersama Pusat)*. Hassan Basry mendesak agar badan ini segera dibentuk, sebab selama badan yang demikian tidak dibentuk ALRI Divisi IV akan "terus bertindak sesuai dengan garis revolusi" (Kalimantan berjuang;30-8-1949;Dijk;1995;218).

Rupanya tuntutan-tuntutan ALRI Divisi IV tidak dipenuhi, maka mulailah aksi-aksi penculikan pegawai negeri dan menganjurkan untuk

melakukan apa yang disebut sebagai "pemogokan Umum" dan melancarkan serangan terhadap Belanda di beberapa daerah Kandangan, Martapura, Rantau, Barabai, Amuntai dan Banjarmasin. Dalam sebuah laporan pada 3 -4 September kira-kira ada 30.000 orang yang berdiam dalam radius 3 Km dari pusat kota meninggalkan kota. Pada waktu bersamaan muncul sebuah Divisi yang menamakan organisasinya Divisi Tengkorak Putih (Kalimantan Berjuang, 9-9-1949, 17-9-1949; Dijk, 1995; 219).

Akibat kegiatan gerilya yang meningkat, maka diperlukan campur tangan dan bantuan Pemerintah Republik. Pemerintah ini telah mengumumkan melalui juru bicara Mayjen R Suhardjo Harjowardojo yang membawa misi di bawah UNCL, meskipun terjadi pertentangan terhadap status juru bicara terutama penolakan oleh daerah-daerah otonomi, dengan membawa mandat perintah dari Panglima tertinggi Tentara

Republik, Jenderal Sudirman. Akhirnya R Suhardjo H dan Hassan Basry kedua bertemu di Minggu Raya. Pertemuan disaksikan oleh kolonel Neals, Pejabat militer Belanda, AR Holmann dan anggota Dewan Banjar. (Kalimantan Berdjuang;29-8-1949;Dijk;1995;220).

Status resmi ALRI Divisi IV secara formal dikukuhkan. Mayor Jenderal R Suhardjo Harjowardojo menyatakan "Bersama ini satu atas nama Panglima Tertinggi menyatakan diresmikannya pembentukan Divisi keempat Angkatan Laut sebagai Tentara Republik secara resmi menyampaikan perintah dihentikannya semua pertempuran dan tindakan-tindakan permusuhan lainnya antara ALRI Tentara Republik dan Tentara Belanda (Kalimantan Berdjuang; 3-9-1949; Dijk 1995;220)

Sesudah tercapainya konsensus dalam pertemuan Hassan Basry beserta pembantu-

pembantunya tanggal 14 September dengan pihak Belanda Deelman dan Veenendaal tentang penafsiran "tindakan permusuhan" dengan hasil yang terpenting bahwa ALRI Divisi IV mengakhiri pemogokan dan menghentikan pemungutan segala macam pajak, perundingan kemudian dapat dimulai dengan bersungguh-sungguh dengan puncaknya pembentukan Panitia Penyelenggara Keamanan dengan jumlah subkomisi setempat di berbagai Kota Banjarmasin, Amuntai, Kandangan (Kalimantan Berdjung 27-9-1949;Dijk;1995;222)

Mayor Jenderal Suhardjo Harjowardojo yang kembali tanggal 21 September dengan membawa 13 perwira sebagai apa yang disebut *Delegasi Militer* ke Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Letnan Kolonel K Sukanda Bratamenggala yang segera menjadi Panglima Kalimantan. Dengan posisi ini apakah berarti telah terjadi dualisme pemerintahan militer di

Kalimantan (Panglima Tertinggi ALRI Divisi IV Hassan Basry dan Panglima Kalimantan Letkol Sukanda Bratamenggala)

Untuk mengakhiri Citra bebas yang ditonjolkan ALRI Divisi IV, Hassan Basry mengirimkan perintah kepada semua perwiranya untuk mengendalikan para gerilyawan setempat. Pada 4 Oktober ALRI Divisi IV mengumumkan sejak hari itu cap mereka tidak lagi mempunyai kekuatan yang sah (KB 4-10-1949, Dijk, 1995;223) dan Sukanda Bratamenggala membuat pernyataan yang kira-kira isinya ALRI Divisi IV telah menyetujui, semua perintah lisan dan surat edaran yang dikeluarkan pada masa lalu dinyatakan tidak berlaku lagi (KB 4-10-1949; Dijk 1995;723).

27 Oktober 1949, para pejabat Republik mulai mengadakan pemeriksaan kesehatan pada para gerilyawan ALRI Divisi IV dibawah pengawasan Dr Suharsono, mereka diperiksa

untuk melihat siapa yang fisik cukup kuat untuk tetap dalam Tentara Republik dan siapa yang harus didemobilisasikan dan "kembali ke masyarakat". (Kalimantan Berdjung 2910-1949, 3-11-1949, Dijk, 1995;224)

Ada semacam "ketidaksenangan" dikalangan gerilyawan terhadap aturan baru yang ketat oleh Tentara Republik, demikian pula para komandan ALRI yang selanjutnya mendapat perintah untuk mengikuti kursus pendidikan.

10 November 1949 dalam peringatan pertempuran Surabaya, ALRI Divisi IV diubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat dalam suatu upacara singkat di Kandangan dengan komandan Hassan Basry, ia tidak menjadi Panglima untuk seluruh Kalimantan.

22 Desember 1949 Sultan Yogyakarta Letnal Jenderal Hamengkuboworo IX, ketika itu menteri Pertahanan, mengunjungi Banjarmasin

dalam kedudukannya selaku koordinator Keamanan lalu mengangkat Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala, ketika itu masih ketua Delegasi Militer dalam jabatan itu dengan gelar Panglima Tentara dan Territorium (11) VI.¹⁴¹²

Hassan Basry dijadikan komandan salah satu dari empat sub wilayah yang dibentuk ketika itu juga, yaitu subwilayah III yang meliputi Banjar. Karena keadaan darurat perang masih berlaku, pemerintah sipil tunduk kepada pemerintahan militer. Dalam urusan sipil Hassan Basry dibantu Muh Hanafiah, demikian diumumkan (Kalimantan Berjuang 24-12-1949, Dijk 1995; 224).

¹⁴¹² Dalam versi yang lain bahwa ketika kunjungan Sukanda Bratamenggala beserta Hassan Basry ke Yogyakarta menemui Sultan Hamengkubowono IX, keduanya mendapat perintah untuk menghadap Presiden Sukarno di Jakarta. Dalam pertemuan dengan Presiden itu, Sukarno berkata kepada Hassan Basry "Apakah Panglima Tentara dan Teritorium masih diperlukan di Kalimantan", Hassan Basry menjawab "masih diperlukan" kalau begitu Sukanda Bratamenggala sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Kalimantan, kata Sukarno.

Proses mobilisasi besar-besaran oleh Pemerintah Republik tentu saja menimbulkan kekecewaan dipihak anggota ALRI Divisi IV - Divisi Lambung Mangkurat, sejumlah prajurit dan perwira kemudian melakukan “pembangangan”.

14 Januari 1950 Letnan H Damanhuri ditangkap karena dituduh memeras barang dan uang guna membangun dan membina tentaranya sendiri di Barabai. Akhmad Zakaria bekas komandan ALRI Divisi IV dituduh menghasut melalui Masjid-Masjid dan lembaga pendidikan Islam dan berusaha mengajak bekas gerilyawan untuk memberontak dan para anggota ALRI lainnya dikirim ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Barat, sebagian lagi ke Jawa Barat untuk membantu penumpasan gerakan Darul Islam (Kalimantan Berjuang 1-1-1950, 27-11950. Dijk;1995;227-228)

Disamping tentu saja sesudah pembentukan Tentara dan Teritorium Kalimantan di bawah Panglima Sukanda Bratamenggala, sub divisi Lambung Mangkurat dibawah Hassan Basry berangsur-angsur kOrang dipakai.

Divisi Lambung Mangkurat, banyak kehilangan anggota terbaiknya, ketika 40-50 orang dari mereka dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus untuk perwira di Akademi Militer Nasional (Kalimantan Berjuang, 1-1-1950. Dijk 1995;228). Barangkali karena kesalahan komunikasi ---para perwira itu setibanya di Yogyakarta mengetahui bahwa Akademi Militer Nasional telah ditutup lebih dari setahun setelah kedatangan mereka.

Banyak perwira kemudian memutuskan untuk kembali ke Kalimantan tak lama kemudian mereka menolak masuk Tentara Republik atau tidak mau didemobilisasi dan mengikuti

gerilyawan lain masuk hutan, dalam gelombang terakhir ini termasuk seorang pejuang Mujahidin Ibnu Hadjar (Dijk;1995;228) yang dalam ALRI Divisi IV berpangkat Letnan Dua.

Tekanan Tentara Republik agar pertempuran yang dilakukan oleh "gerilyawan liar" dihentikan dengan meminta Hassan Basry untuk menjalankan tugas itu. 20 September 1950 ia disertai pimpinan Komando Penyelesaian Hulu Sungai dan bulan berikutnya daerah itu diberi Bantuan Militer (Militaire Bijstand) dan satuan-satuan Tentara Republik masuk lagi untuk memulihkan keamanan.

Mula-mula ia melakukan dengan cara damai, tetapi gagal, akhirnya --walaupun ia pasti menaruh simpati terhadap tuntutan para gerilya--, 16 Oktober 1949 Komando penyelesaian wilayah Sungai mengemukakan, penyelesaian secara damai tidak mungkin, Tentara dan Politisi mulai

melakukan "pembersihan" (baca: sweeping) yang bersamaan dengan itu diberlakukan jam malam. Tetapi kemudian gagal juga memaksa penghentian. 11 November 1949 Komando ini dibubarkan. Tidak lama sesudah itu Hassan Basry menyerahkan pimpinan pasukan Republik Kalimantan Selatan - kini disebut Brigade F — yang kemudian diambil alih oleh Mayor HT. Sitompul. (Dijk; 1995;231).

Dalam suasana tegang di Kalimantan Selatan, kehadiran Hassan Basry yang masih tinggi dalam pandangan kaum gerilyawan, dianggap terlalu berbahaya. Karena itu Kementerian Pertahanan memberikannya beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Maka Hassan Basry pun meninggalkan Kalimantan menuju Mesir pada tahun 1951. (Indonesia Merdeka, 20-9-1951, Indonesia Baru 12-8-1953,29-9-1955, Dijk 1995; 232-233).

Pemilu 1955 multi partai dan pemilu 1971 melalui penyederhanaan partai politik tahun 1973 mencatat peristiwa penting bagi perjalanan Hassan Basry. Menurut catatan HMS. Hasbie tentang posisi Hassan Basry dalam partai politik pada suatu hari tahun 1972 beliau keluar dengan senyumnya yang khas, menyalami dengan ramah semua yang ada disekitarnya. Beliau baru saja keluar, dari pertemuan segitiga dengan staf Kopkamtib Laksamana Sudomo dan Menteri Kesra KH.Dr.Idham Chalid, di Jalan Mangunsarkoro 51 Jakarta Pusat.

Dari Pak Idham kami mendapat informasi, hari itu Pak Hassan, panggilan akrab beliau, *diminta mengundurkan diri* dari Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan sebuah partai bukan partai berkuasa, hari itu kemudian menjadi titik kulminasi dari perjalanan karirnya karena berbeda

pandangan dengan penguasa waktu itu. Kiprahnya di berbagai bidang kandas.¹⁵¹³

C. Dua Opsi Masyarakat Banjar di Amuntai: Islam atau Nasionalis

Sikap Oposisional masyarakat Banjar tampak lebih konkret dengan memahami peristiwa Amuntai 27 Januari 1953. Bertempat di lapangan sepak bola Amuntai, sekelompok massa berkumpul untuk menyatakan sikap terhadap pemerintah pusat terutama menyangkut landasan ideologi negara. Pernyataan sikap ini nampaknya sebagai sebuah aspirasi politik atas belum jelasnya landasan negara yang sejak tahun 1950 an telah menjadi diskursus penting di kalangan elite politik di Jakarta terutama oleh Presiden Soekarno yang secara sistematis menawarkan masalah ideologi

¹⁵¹³ Drs. HMS Hasbie, Posisi Kalimantan Selatan Dalam Lintasan Sejarah Negara Kesatuan RI. Musyawarah Besar Masyarakat Kalimantan se Indonesia, Jakarta 7 Mei 1999 hal 7.

Pancasila dan paham kebangsaan. Pertanyaan masyarakat Amuntai bahkan merupakan reaksi daerah terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Cornelis Van Dijk (1995) sebagaimana diikuti Abdurrahman (1998) mengeksplorasi gejala-gejala daerah dan kegelisahan Soekarno pada berbagai "pemberontakan" lokal basis Darul Islam.

Kunjungan Soekarno ke Kalimantan Selatan berlangsung dalam rangka pemeriksaan daerah-daerah pusat kekacauan di Indonesia pada akhir Januari 1953. Di Kalimantan Selatan tempat-tempat yang dikunjunginya antara lain Banjarmasin, Negara, Barabai, Kandangan, Martapura dan Amuntai. Yang merupakan persoalan pokok selama seluruh kunjungan ke Kalimantan Selatan adalah kedudukan Islam dalam masyarakat dan masalah hangat apakah Indonesia

akan menjadi Negara Islam atau tidak. Inilah beserta masalah keamanan yang merupakan tema utama pidato-pidato Soekarno. Presiden dapat melihat dengan matanya sendiri akibat-akibat pemberontakan KRIYT sementara melakukan perjalanan dari Martapura ke Kandangan.

Di Kandangan beberapa pemberontak menghentikan sebuah truk tentara dan membakarnya tak lama sebelum kedatangan Soekarno dan kerangka yang hangus itu belum sempat dipindahkan ketika Soekarno lewat. Berulang-ulang Soekarno menekankan perlunya pemulihan keamanan dan persatuan. Di Kandangan dikemukakannya "membunuh dan membakar rumah maupun mengacau ketertiban jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam". Dan ditambahkan "kecuali kita dihancurkan oleh rakyat kita sendiri, Indonesia akan hidup terus" (PR 29-1-1953, Van Dijk, 1995;241)

Banyak keributan ditimbulkan oleh ucapan-ucapan Soekarno mengenai masalah agama (Islam) dan dasar ideologi negara. Bahwa sebagian golongan masyarakat di Kalimantan Selatan menentang sikap Soekarno tentang peranan Islam dan penyebaran Marhaenismenya jelas terbukti ketika ia tiba di Hulu sungai. Dalam apa yang dilukiskan sebagai suasana yang tegang suatu ayat Qur'an disampaikan kepadanya yang berbunyi "Taatilah Allah dan Taati Rasul Nya, dan orang-orang yang memegang teguh kekuasaan di antara kamu" (Sura 4;59).

Dalam catatan Cornelis Van Dijk selanjutnya, Puncaknya tercapai di Amuntai, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang menimbulkan amarah kalangan Muslim, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di sebagian besar bagian lain di Indonesia. Pidato tidak dengan persiapan,

sebagaimana sambutan Soekarno terhadap slogan-slogan yang diperlihatkan massa yang berbunyi :

"Harap jelaskan; Negara Nasional atau Negara Islam?"

"Bung Karno, Apakah arti Marhaenisme?"

Bagian pidatonya yang terkenal ini, yang sangat menggusarkan kaum Muslimin Indonesia adalah mengenai pendapat Soekarno tentang negara Islam, masalah yang sejak tahun 1945 menarik perhatian kaum politisi Muslim maupun sekuler.

Reaksi paling keras adalah dari salah satu partai politik, Masyumi Kalimantan Selatan Pidato itu mereka anggap sebagai *propaganda berat sebelah*, karena tidak dikemukakan pilihan alternatif suatu partai politik dengan ideologi Islam atau dengan cita-cita mendirikan negara Islam.

Reaksi yang sama terjadi di Aceh. Pernyataan Presiden ini mendapat reaksi dari para Ulama Aceh yang pada masa revolusi pernah

berjanji untuk mendasarkan Indonesia pada prinsip-prinsip Islam atau setidaknya-tidaknya menjadikan Aceh daerah Islam. Akibatnya ketika mengunjungi Aceh pada Maret 1953 ia disambut dengan panji-panji.

"Kami menyelesaikan pidato Presiden di Amuntai"

"Kami menuju Negara Islam"¹⁶¹³

Di Jakarta M.Isa Anshori dari Masyumi mencap pidato itu sebagai "tak demokratis, tidak konstitusional, dan bertentangan dengan ideologi Islam", dan oleh organisasi-organisasi seperti NU dan GPH. Begitu juga tokoh Ketua HMI Dahlan Ranuwihardjo mengirim surat kepada Soekarno untuk meminta penjelasan.

Tanggal 7 Mei 1953 dalam suatu ceramah di Universitas Indonesia Soekarno menjawab pertanyaan soal pidato Amuntai. "Ketika aku berdiri di Amuntai menghadapi pertanyaan: "Bung

¹⁶¹³ Nazaruddin Sjamsuddin, "Pemberontakan Kaum Republik" Kasus Darul Islam Aceh (1990 p p248-49)

Karno, Kami inginkan penjelasan, apakah kita harus mendirikan Negara Nasional atau Negara Islam" —ketika aku berdiri di sana, ketika itu sebagai presiden Republik Indonesia, sesaat pun tak ada terkandung maksud untuk melarang kaum Muslim memajukan atau mempropagandakan cita-cita Islam. Sebagai presiden, dilanjutkannya, dan karena itu harus mempertahankan konstitusi, dia harus menjawab, Indonesia adalah "negara nasional", tetapi dengan demikian, tidaklah meremehkan hak warga negara untuk menyebarkan pandangan dan cita-citanya sendiri.¹⁷¹⁴

Pertanyaan masyarakat Amuntai terhadap persoalan paling fundamental tentang dasar negara, tentu saja patut menjadi sejarah penting bagaimana penempatan sikap politik masyarakat Banjar dalam praktik penyelenggaraan ideologi

¹⁷¹⁴ Cornelis Van Dijk, loc cit pp 241-422

negara beserta implikasi yang ditimbulkan terhadap partai politik maupun terhadap kepemimpinan dalam Islam yang tidak boleh berpaling atau tidak menyandarkan diri pada Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

VII. POLITIK SENTRALISTIK ORDE BARU

A. Munculnya Elit Politik Modern

Dalam konteks elite politik lokal, penelusuran paling umum dilakukan adalah melalui aktivitas organisasi yang menjadi konsentrasi dan kiprahnya atau keberpihakan pada tingkat perjuangan institusi beserta perangkat wacana yang mendukungnya.

Munculnya elite politik di Kalimantan pada tingkat nasional nampaknya dapat ditelusuri pada tiga jalur penting : Pertama adalah dengan menggunakan jalur keulamaan, Kedua melalui jalur organisasi agama dan partai politik dan Ketiga

melalui jalur pendidikan dan karir pemerintahan dan militer.

Diantara banyak tokoh yang muncul dalam jalur munculnya elite politik modern itu adalah *KH.Idham Khalid* yang dalam kontek komunitas Islam di Kalimantan Selatan ia adalah seorang ulama, akan tetapi pada tahap Indonesia ia lebih merupakan “tokoh organisasi”. Keulamaannya mungkin merupakan credential pertama baginya untuk mendapatkan kepercayaan dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, tetapi mobilitas vertikalnya lebih dan sangat ditentukan oleh keharusan dan harapan organisasi yang dianggap telah dipenuhinya.¹⁸¹⁴

Hal ini mungkin sangat berbeda dengan apa yang terjadi dengan tokoh Banjar lain yang menempuh jalur organisasi agama dan partai politik yang menjadi tokoh daerah dan kemudian

¹⁸¹⁴ Lihat Taufik Abdullah, LP3ES Jakarta 1996 p 75

menjadi tokoh nasional, jalur non tradisional sebagaimana yang kita temukan pada seorang KH Hasan Basri mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, keutamaannya di daerah lebih dikenal dalam kiprahnya dalam pendidikan dan gerakan dakwah, tetapi jalur vertikalnya dalam kedekatannya dengan negara ia lebih merupakan seorang Ulama daripada seorang organisasi keagamaan semacam Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. KH Hasan Basri mungkin sama halnya dengan HAMKA, ia adalah seorang ulama dalam kontek nasional tetapi pada tingkat organisasi Muhammadiyah HAMKA tidak menduduki jabatan pusat.

Jalur yang paling umum dari munculnya elite politik modern Orang Banjar adalah melalui partai politik yang dibangun di tingkat lokal, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan menemukan wilayahnya dalam kancah perpolitikan nasional sebagaimana halnya

kita menemukan pada Rusli Desa, Anang Adenansi, kendatipun basis utama dua tokoh ini adalah Media Massa. Pada sejumlah organisasi dengan prestasi pendidikan/karena profesionalitas dan kualitas individual muncul namanama H.Saadilah Mursyid mantan sekretaris Kabinet Pembangunan Orde Baru, H Johan Effendi kini sekretaris bidang pemerintahan kabinet persatuan KH.Abdurrahman Wahid.

Jalur ketiga nampaknya merupakan "jalur langka" yang ditempuh oleh elite politik daerah yaitu dengan menggunakan jalur militer, nama seperti Letjen ZA.Maulani yang membangun karier militer sebagai basis perjuangan lokal sehingga mencapai prestasi puncak dalam kabinet BJ Habibie sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN), selain itu karena kedekatannya dengan dunia akademis, Letjen ZA.Maulani banyak diterima kalangan universitas-universitas di Pulau

Jawa (antara lain di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas 17 Agustus Jakarta)

Sejumlah elite penting lain yang dapat disebut kiprahnya kontek pembangunan pada level nasional dan nampak orientasi politik yang dimainkan tentu saja kita menemukan sejumlah nama seperti terutama memasuki era tahun 1990 an seperti H Syamsul Mu'arif, HA.Sulaiman HB, Syamsiwal Qamar, Syafriansyah, tetapi munculnya elite politik modern ini nampaknya tidak segera diikuti oleh perspektif Gender, entah mengapa daerah ini mengalami kelangkaan tokoh wanita yang dapat berkiprah pada tingkat nasional.

Sepanjang dinamika politik lokal yang dimulai pada kepemimpinan gubernur Soebardjo, satu persatu elite politik lokal itu muncul sebagai tokoh-tokoh penting, kendatipun harus diakui bahwa munculnya elite politik itu belum dilakukan secara sistematis, artinya masyarakat Banjar belum

mempunyai sebuah pola yang mengarah kepada penyusunan regenerasi yang seimbang dan mendasar. Tampilnya elite politik berlevel nasional acapkali lebih disebabkan oleh kualitas pribadi ketimbang beranjak pada basis dukungan massa.

B. Tercerabutnya Politik Lokalitas Orang Banjar

Sangat mungkin bahwa orientasi politik Orang Banjar fase awal dipengaruhi oleh latar sosial budaya dan Islam. Pada Pemilu 1955 misalnya terlihat kuatnya Islam melalui dua partai Islam dalam pemilihan umum (NU dan Masyumi) sebagai pengumpul suara terbanyak yang masing-masing meraih suara 380.874 dari Partai NU dan 252.296 Partai Masyumi.

Penelitian Herbert Feith yang kemudian diikuti Khairiadi Asa (1999) menemukan sejumlah partai lain yang cukup besar memperoleh suara

pada Pemilu 1955 seperti PNI dengan 46.440 suara. PKI dengan 17.210 suara. IPKI 19.383 suara.¹⁹¹⁵

Tabel II.
Peroleh Suara Partai Politik Pemilu 1999
Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan

No	Partai	Perolehan Suara Kalimantan Selatan	No	Partai	Perolehan Suara Nasional
1	NU	380.874	1	PNI	8.434.653
2	Masyumi	252.296	2	Masyumi	7.903.886
3	PNI	46.440	3	NU	6.955.141
4	IPKI	19.383	4	PKI	6.176.914
5	PKI	17.210	5	PSII	1.091.160
6	PPTI	16.429	6	Parkindo	1.003.325
7	P.Daya	11.641	7	P.Katolik	770.740
8	PSII	6.717	8	PSI	753.191
9	PSI	5.307	9	IPKI	539.824
10	PRN	4.648	10	Perti	483.014

Sumber : Herbert Feith, Khairiasi Asa 1999;59

¹⁹¹⁵ Herbert Feith dan juga Khairiadi Asa Multi Partai Dalam Perspektif Lokal Suatu Tinjauan Dinamika Politik di Kalimantan Selatan, Griya Kertiyasa, Jakarta 1999 pp 60-61

Analisis Herbert Feith dan Khairiadi Asa (1999) menunjukkan bahwa secara nasional partai-partai Islam di Kalimantan Selatan paling tinggi persentase perolehannya yaitu mencapai 81.35 persen sedangkan partai-partai non agama hanya mencapai 11,2 persen, hal ini mungkin dipandang sebagai pengaruh kuat dari tuntutan dalam pertanyaan masyarakat Kalimantan Selatan di Kota Amuntai tahun 1953 tentang Ideologi Negara.

Akan tetapi dan tentu saja hal ini sudah berlaku umum bahwa tampilnya kepolitikan Orde Baru. Dinamika politik lokal mengalami distorsi yang sangat besar. Partai-partai basis Islam kembali tidak menemukan posisinya yang kuat dalam perolehan suara di daerah-daerah dengan tampilnya mesin politik Orde Baru ditambah dengan atribut Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus digunakan oleh semua partai politik.

Begitulah orientasi politik Orang Banjar, tidak lagi menemukan wilayah ideology Islam sebagai akibat "politik deideologisasi" partai politik dan untuk selanjutnya memilih jalan pragmatisme atau bertahan dengan orientasi pilihan politik dan keyakinannya.

Politik Deideologisasi dan Politik Stabilisasi Orde Baru tentu saja sangat terasa sebagai upaya sistematis penghilangan isu-isu daerah yang berkembang dalam setiap kampanye politik sejak Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan mencapai puncaknya pada Pemilu 1997.

Orientasi pragmatisme Orang Banjar dalam politik pada kemungkinan kedua adalah menyangkut konstelasi situasi ekonomi yang mulai kehilangan kekuatannya, dengan kata lain bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang menurun. Mengharuskan orang untuk berperilaku pragmatis.

C. Perdebatan Sekitar Orientasi dan Pemahaman

Perdebatan penting sekitar orientasi politik Orang Banjar, tentu saja sekitar perspektif kultural maupun struktural yang menyertai fakta-fakta yang berkembang baik dalam pemilihan umum maupun keterlibatannya dalam lembaga politik, lembaga bisnis dan perdagangan maupun birokrasi pemerintahan atau militer.

Masyarakat Banjar dalam banyak pandangan disebut sebagai masyarakat dengan etos dagang, dalam sejumlah perbincangan disebut ada pertalian antara etos social dengan etos politik bahkan dalam pandangan Mohammad Sobari²⁰¹⁶ pertalian itu berlanjut dengan soal-soal kesalehan dengan tingkah laku pada komunitas masyarakat tertentu.

²⁰¹⁶ Lihat Mohamad Sobari, Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi, Benteng Yogyakarta, 1999

Jikalau *Mamanda* memang dianggap sebagai salah satu yang dapat menjadi simbol masyarakat Banjar, kita dapat sedikit mengambil kesimpulan tentang dunia Banjar sebagai dunia "penuh humor dan penuh ketegangan terhadap kekuasaan".

Mamanda yang menyajikan cerita kerajaan Banjar sehari-hari dengan tokoh utama seorang *Gelar Patih, Permaisuri, Punggawa* dan *Ulama Tuha* dan *para dayang* dan *Pembantu-pembantunya* yang berjuang melepaskan ketidakadilan terhadap penguasaan Belanda dan tuan tanah beserta pemahaman tentang *Kerinduan, cinta, kebencian* dan juga *penghianatan*.

"Dalam *Mananda* Orang menikmati cerita-cerita mengenai sebuah Kerajaan Banjar. Orang merasa bahwa cerita yang dilakonkan di panggung adalah cerita kehidupan mereka bukan hanya karena kelancaran dalam syair "*nang baik budi*" tetapi juga yang nampak adalah keseluruhan latar

sosial budaya dan Islam yang juga nampak sebagai gambaran dalam realitas kehidupan mereka sehari-hari itu. Inilah juga kemungkinan bahwa orang Banjar memahami bahwa terdapat kemiripan dalam cara mereka mengorientasikan tingkah-laku mereka sehari-hari atau dalam dunia kepolitikan".

Orientasi dan pemahaman politik yang bersandarkan sosio budaya dalam konteks sikap pragmatisme Orang Banjar kontemporer dapat ditemukan ketika pemilihan Gubernur atau Bupati dan Walikota. Para calon Gubernur/Walikota atau Bupati itu acap kali dalam posisi yang "diam" sementara yang paling berperan atau "*nang pinda paling ribut*" adalah komunitas yang berada disekeliling sang kandidat, itulah sebabnya konsep "*panggubangan*" selalu muncul dalam suksesi kepemimpinan di Banua Banjar. Sebuah konsep yang sangat getir menjadi semacam nilai "*Lamun*

Kahada Jadi Duit Baras, jangan digawi" atau "Kita, Diwit Kada Bakula-lah" dalam kontek panderan digetek sebuah Surat kabar lokal.

VIII. REAKTUALISASI POLITIK ORANG BANJAR

Ya Allah Kuatkan Iman
Murahkan Rezeki, bagi kami
Dan Panjangkanlah Umur

(Do'a Nisfu Sa'ban Masyarakat Banjar mengiringi
membaca Surah Yaasin)

Do'a di atas yang diucapkan memasuki Nisfu Sa'ban dalam mengiringi membaca Surah Yaasin yang dilakukan oleh setiap keluarga keluarga rumah tangga, masjid atau langgar, do'a itu menunjukkan kesalehan agama dan semangat dagang. Paling tidak bahwa do'a itu merupakan spirit agama yang cukup kuat sehingga memungkinkan munculnya kesadaran kreatif mengenai hubungan antara ajaran-ajaran agama

dengan perilaku ekonomi masyarakat Banjar. Semangat diberikan kemurahan rezeki dan umur yang panjang, menunjukkan salah satu aspek dari kehidupan perdagangan yang kental di masyarakat Banjar sehingga pada ujung kemurahan rezeki itu pasti dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah haji. Salah satu komunitas Banjar hulu sungai misalnya, melihat bahwa etos kerja yang mereka perlihatkan adalah berkaitan dengan soal kesalehan itu. "bagawi bahimat kawa gasan tulak haji." Oleh karena itu terdapat kaitan yang "ideal" dengan yang "riil" dalam praktek perdagangan masyarakat Banjar.

Ulun dua puluhan tahun umpat "abah" badagang menelusuri sungai Negara, dan Barito ini. Mulai waktu masih "kakanakan", Ulun umpat Abah mandatangi satu pasar ka pasar lainnya sapanjang sungai nang kami singgahi Kami badagang Minyak Gas, Dapur, Kajang, Uyah, Minyak Lamak. Kami

makan minum hari-hari ya di Jukung ngini. Abah sudah Haji, ulun sudah ada tabungan Gasan Tulak bahaji tahun dudi.

Apakah etos kerja sebuah keluarga *Nagara* Hulu Sungai dalam wawancara diatas dapat direfleksikan ke dalam dunia kesadaran politik Orang Banjar. Sehingga dalam peta kepolitikan yang muncul adalah soal "idealisme" atas soal-soal "riil" masyarakat Banjar.

Tentu saja pada bagian ini, basis sosio budaya dan agama harus dapat direfleksikan ke dalam tatanan kehidupan politik yang kerap kali memang mengandung dualisme antara idealisme di satu sisi dengan kenyataan yang sedang dihadapi khususnya terhadap perubahan-perubahan sosial dan pembangunan yang sedang berlangsung dengan cepat.

Transformasi budaya dengan basis religiusitas masyarakat Banjar, tentulah ada

keinginan untuk sebuah "kontemplasi" kebelakang sebagaimana dijumpai melalui banyak tokoh penting di Banjar maupun di luar daerah Banjar masa lampau yang memberikan ruang pemahaman kesadaran sehingga masyarakat Banjar mempunyai posisi dan jati diri yang disegani oleh masyarakat lain dalam kosmopolitanisme masyarakat Banjar (sebagaimana jaringan ulama dan perdagangan masa lampau yang telah dirintis dengan sangat baik) untuk menatap masyarakat Banjar yang sejati di masa depan.

IX. PENUTUP

Pembahasan terakhir dalam bab ini bahwa di masyarakat Banjar posisi Ustadz, Kiai, Tuan Guru menempatkan posisi sosial yang cukup penting. masyarakat nampak lebih hormat kepada tokoh-tokoh ini ketimbang kepada yang lain. Haji

dipandang lebih tinggi kedudukan sosial daripada bukan Haji terutama di pedesaan Banjar.

Orientasi dan kesadaran politik Orang Banjar diantaranya dan termasuk didalamnya masih "menyandarkan diri" pada pemimpin non formal itu. Dunia politik Orang Banjar, pada sisi lain mengundang misteri bahkan agak sulit untuk menebak arah orientasi yang kadang cepat berubah sehingga komunalitas konsep "bubuhan" kerap telah mencair dengan polarisasi baru dalam komunitas Banjar (adalah biasa dalam sebuah rumah tangga Banjar berbeda pilihan partai politik pada pemilihan umum atau berbeda dalam pandangan ideologi partai).

Kecuali itu konsep "bubuhan" telah melebar tidak hanya sekadar oleh latar sosial dan budaya Bubuhan Haji Manan, Bubuhan Tukacil, Bubuhan Hulu Sungai, Bubuhan Batang Banyu, Bubuhan Martapura, tetapi juga Bubuhan Bulan Bintang,

Bubuhan Golkar, Bubuhan PKS atau Bubuhan Pajabat yang kemudian bisa juga beralih sebagaimana bunyi undangan "kami basaruan "Aruh Ganal" gasan Haji Jali Sapabuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qahhar Mudzakkar, 1999, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia, Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, Penerbit Darul Falah.
- Abdurrahman, 1998, *Peristiwa Amuntai 1953 dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Politik di Indonesia*.
- Ahmad Adaby Darban, 2000, *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Penerbit Terawang Yogyakarta.
- Al Chaidar, 1999, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia. SM.Kartosowirjo. Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru*. Penerbit Darul Falah.
- Amir Hasan-Kiai Bondan, 1953, *Suluh Sedjarah Kalimantan. Tjetakan Pertama, M.A.I. Pertjetakan "Fadjar" – Banjarmasin*.
- Anhar Gonggong, 2000, *Resistensi Terhadap Federalisme, Trauma Van Mook atau Budaya Politik Sentralistik. Dalam Otonomi atau Federalisme, Sinar Harapan-Suara Pembaruan Jakarta*.
- Azyumardi Azra, 1999, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Rajawali Press Jakarta.
- Budhi, Setia. (1996). *Transformasi politik agraria:: Kasus petani Madura dan pembangunan waduk Nipah Kabupaten Sampang* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Budhi, Setia. (2015). *Bugis Pagatan: Migration, Adaptation and Identity*. IOSR Journal Of

- Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 20(5), 71-78.
- Budhi, Setia. (2018). Rain, River and Religion A Study of Negotiating Identity of Bakumpai People in Kalimantan, Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 12(9), 26-30.
- Budhi, Setia. (2018). Two Window and One Rivers The Possibility of Dayak Meratus People in Capitalist Society. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 12(8), 90-93.
- Budhi, Setia. (2019). *CSR & Social Entepreneurs*. Komojoyo Press. Yogyakarta
- Budhi, Setia. (2020). *Rethinking Dayak Identity*. Komojoyo Press. Yogyakarta
- Budhi, Setia. Bakumpai People, Religion And Identity An Regional Autonomy Study Of Communal Identity In South Kalimantan.
- Budhi, Setia. Siraung Bini dan Tanggui Bini, Selayang Pandang Perempuan Melayu di Kampung Muara Kuin Banjarmasin dan Kampong Ayer Brunei Darussalam. *Siraung Bini dan Tanggui Bini, Selayang Pandang Perempuan Melayu di Kampung Muara Kuin Banjarmasin dan Kampong Ayer Brunei Darussalam*.
- Cornelis Van Dijk, 1995, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Cetakan ke IV Pustaka Utama Grafiti Jakarta.
- Endang Suhendar, Yohana Budi Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung.

- Fachry Ali, 1996, Bagaimana Negara Menghampiri Rakyat ? Masyarakat Aceh dan Negara Orde Baru, Pascasarjana. UGM Yogyakarta.
- Gazali Usman, 1994, Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam, Lambung Mangkurat University Press Banjarmasin.
- Helius Sjamsuddin, 1991, Islam and Resistance in South and Center Kalimantan in The Nineteenth and Twentieth Century. Dalam MC.Ricklefs (ed) Islam in The Indonesian Socival Context, Clayton Monash University Australia.
- Herbert Feith, Lance Castles, 1988, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, LP3ES Jakarta.
- Khairiadi Asa, 1999, Multi Partai Dalam Perspektif Politik Lokal Suatu Tinjauan Dinamika Politik di Kalimantan Selatan. Griya Kertiyasa Jakarta.
- Kurdi, Sulaiman, 2007 "Politik Kaum Sufi : Studi Gerakan Beratif Baamal di Banjarmasin",Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Moch Nurhasim, 1997, Gejolak Arus Bawah : Tuntutan Perubahan Format Politik Pra dan Pasca Pemilu 1997. AIPI Bandung.
- Mohamad Sobary, 1999, Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi, Bentang Yogyakarta.
- Mohammad Najib (ed), 1996, Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara. LKPSM Yogyakarta.
- Mujiburrahman, M., Suryadi, B., & Budhi, S. (2019). Public Information Disclosure Policy

- Implementation In Department Of Information And Communication Coding In North Barito District, Central Kalimantan Province, Indonesia. European Journal of Political Science Studies.
- Nazaruddin Sjamsuddin, 1998, Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. UIP Press Jakarta.
- Pambudi, S., Budhi, S., & Jamaluddin, J. (2019). EFFECT OF PROLIFERATION AREA District And Infrastructure Development On Public Service Teweh Baru, District In North Barito, Indonesia. European Journal of Political Science Studies.
- Pemerintah Propinsi Daerah TK I Kalimantan Selatan, 1990, Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949).
- Rusman, R., Budhi, S., & Jamaluddin, J. (2020). Effectiveness Of The Village Fund Allocation Management (Add) In Rural Development Of Bintang Ninggi Ii District South Teweh, North Barito Regency, Indonesia. European Journal of Economic and Financial Research.

SETIA BUDHI



Penggiat pemberdayaan masyarakat, lahir pada tahun 1965. Ia lulus Magister Sains tahun 1996 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melanjutkan studi dengan mengambil spesialisasi Sosiologi Anthropology di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lulus PhD tahun 2011. Selain mengajar di Universitas Lambung Mangkurat, ia aktif dalam berbagai seminar nasional dan internasional. Tahun 1998 bersama beberapa tokoh Kalimantan mendirikan Center for Regional Development Studies – CRDS untuk kajian opini publik dan pembangunan dan sampai tahun 2000 aktif dalam membangun jejaring sosial dan pemerintahan dan adat pada lima kawasan Kabupaten DAS Barito.

Tahun 2001-2003, Ia adalah salah satu anggota Aliansi Masyarakat Adat Dayak Meratus. Dalam lima belas tahun terakhir ia menekuni bidang anthropology dengan melakukan penelitian, ia juga aktif dalam pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal. Tahun 2004 bersama Tim Jurnalis Kompas melakukan ekspedisi Anthropology Sungai Barito menuju puncak Muller Schawanner dan berakhir di Sungai Mahakam. Tahun 2009-2012 ia menjadi bagian tim pemberdayaan masyarakat di Yayasan Adaro Bangun Negeri - PT Adaro Indonesia dan sejak tahun 2012 bergabung dalam CSR Advisor untuk program pemberdayaan masyarakat PT. Sebuku Iron Lateritic Ores, Site Office Sebuku.

Aktif menjadi narasumber untuk membangun pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola CSR. Sepanjang tahun 2010 hingga sekarang ia aktif menjadi pendamping petani, nelayan dan pengrajin UMKM.

Gerakan Oposisi Orang Banjar

Buku ini adalah catatan sekilas tentang peristiwa di Kalimantan Selatan. Peristiwa yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saya melihatnya sebagai sebuah gerakan berbasis politik. Sampai menjelang tahun 1959, keinginan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia menjadi cita-cita utama perjuangan organisasi-organisasi Islam.

Setia Budhi, PhD

ISBN 978-623-91281-2-8